

**HEGEMONI WACANA KEAGAMAAN DI UIN WALISONGO
(ANALISIS SIMBIOSIS MUTUALISME POLITIK NAHDLATUL ‘ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DI UIN WALISONGO
SEMARANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Aqidah Filsafat Islam

Oleh:

MOH. MISBAKUL MUNIR

NIM: 134111001

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

**HEGEMONI WACANA KEAGAMAAN DI UIN WALISONGO
(ANALISIS SIMBIOSIS MUTUALISME POLITIK NU DAN
MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DI UIN WALISONGO SEMARANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Aqidah Filsafat Islam
Oleh:

MOH. MISBAKUL MUNIR

NIM: 134111001

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Moh. Misbakul Munir

NIM : 134111001

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul skripsi : Hegemoni Wacana Keagamaan di UIN Walisongo (Analisis Simbiosis Mutualisme Politik NU-Muhammadiyah Jateng di UIN Walisongo)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sedikitpun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, April 2020

Moh. Misbakul Munir

NIM. 134111001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabaratuh.

Setelah membaca dan mengoreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Moh. Misbakul Munir

NIM : 134 111 001

Jurusan : Aqidah Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Hegemoni Wacana Keagamaan di UIN Walisongo (Analisis Simbiosis Mutualisme Politik NU-Muhammadiyah Jateng di UIN Walisongo).

Dengan ini saya telah menyetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Semarang, ... April 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Dr. Zainul Adzfar, M. Ag
NIP. 19730826200212002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0547 /Un.10.2/D1/KM.05.01/03/2021

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : MOH. MISBAKUL MUNIR
NIM : 134111001
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : **HEGEMONI WACANA KEAGAMAAN DI UIN WALISONGO (ANALISIS SIMBIOSIS MUTUALISME POLITIK NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DI UIN WALISONGO SEMARANG)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada **13 Mei 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

| NAMA | JABATAN |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Muhtarom, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Fitriyati, M.Si. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Machrus, M.Ag. | Penguji I |
| 4. Yusriyah, M.Ag. | Penguji II |
| 5. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag. | Pembimbing |

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 Maret 2021

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



SULAIMAN

MOTTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”. (HR. Bukhari dan Muslim)

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas taufiq serta hidayah-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: *Hegemoni Wacana Keagamaan di UIN Walisongo (Analisis Simbiosis Mutualisme Politik NU-Muhammadiyah Jateng di UIN Walisongo)*. disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo;
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yang telah merestui pembahasan skripsi ini sekaligus dosen wali yang senantiasa mendukung dan mengarahkan selama saya kuliah;
3. H. Muhtarom, M. Ag., selaku ketua jurusan Akidah dan Filsafat Islam dan Tsuwaibah, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo;
4. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi;
6. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu atas cinta kasih sayangnya serta

kekuatan do'anya, sehingga Alhamdulillah penulis bisa melalui semua rintangan dalam proses kehidupan ini. Serta kepada kakak- kakak kandung penulis yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi secara terus menerus;

7. Segenap Bala Pikir Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) yang menemani saya dalam dialektika pengetahuan.
8. Sahabat-sahabat PMII Cabang Kota Semarang yang menjadi sahabat penulis dalam berdialektika, mengasah diri, baik secara intelektual maupun spiritual. Wadah penulis dalam mengembangkan visi diri kearah yang lebih baik.
9. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Walisongo yang telah bersama penulis dalam berproses menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita- cita kemerdekaan Indonesia.
10. Sahabat-sahabat PMII Rayon Ushuluddin yang senantiasa menjadi sahabat yang baik dan setia dalam bersama-sama memperjuangkan visi dan tujuan organisasi dalam mencetak kader-kader yang berkualitas.
11. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan pengetahuan generasi di masa yang akan datang. Amiin

Wassalamualaikum, wr. wb

Semarang, ... April 2020

Moh. Misbakul Munir
NIM.134111001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| HALAMAN ABSTRAK..... | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| D. Tinjauan Pustaka | 13 |
| E. Metode Penelitian | 16 |
| F. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II. PERAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMBENTUKAN WACANA DI PERGURUAN TINGGI..... | 19 |
| A. Pengertian Organisasi Sosial Keagamaan | 19 |
| B. Peran Lembaga Sosial Keagamaan dalam <i>Empowering Society</i> | 21 |
| C. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Pembentukan Wacana..... | 24 |
| D. Peran Perguruan Tinggi dalam Memproduksi Wacana..... | 30 |
| E. Hegemoni Wacana dalam Masyarakat | 33 |
| BAB III. SINERGITAS NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DENGAN UIN WALISONGO | 38 |

| | | |
|-------------------------|--|----|
| A. | Sejarah dan Profil Singkat UIN Walisongo Semarang..... | 38 |
| 1. | Visi | 41 |
| 2. | Misi | 41 |
| 3. | Tujuan | 42 |
| B. | Sekilas Tentang NU dan Muhammadiyah..... | 42 |
| C. | Bentuk Aktivitas Keagamaan UIN Walisongo..... | 49 |
| D. | Peta Struktur Organisasi UIN Walisongo, NU Jawa Tengah dan Muhammadiyah tahun 2015 hingga Sekarang | 55 |
| 1. | Struktur Organisasi UIN Walisongo | 56 |
| 2. | Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah..... | 59 |
| 3. | Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015-2020..... | 64 |
| E. | Narasi Sosial Keagamaan yang berkembang di UIN Walisongo | 67 |
| BAB IV. PEMBAHASAN..... | | 75 |
| A. | Simbiosis Mutualisme NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah di UIN Walisongo dalam Membentuk Hegemoni Wacana di UIN Walisongo | 75 |
| BAB V. PENUTUP..... | | 86 |
| A. | Kesimpulan | 86 |
| B. | Saran dan Rekomendasi | 86 |
| C. | Penutup..... | |

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

UIN Walisongo sejak berdiri telah menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang konsisten dalam menyebarkan gagasan dan wacana tentang Islam Moderat. UIN Walisongo juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sehingga wacana keagamaan yang ada sering kali adalah gagasan yang dibawa oleh kedua organisasi tersebut. Hal ini menjadikan perkembangan wacana keagamaan di UIN Walisongo hanya didominasi oleh satu wacana keagamaan, yaitu Islam moderat ala NU dan Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, dominasi tersebut ternyata didukung oleh faktor kekuasaan politik yang juga didominasi oleh kedua kelompok tersebut. Penelitian bersifat eksplanatif dan analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hegemoni wacana keagamaan yang ada di UIN Walisongo dipengaruhi oleh simbiosis mutualisme politik dan ideologis antara NU dan Muhammadiyah.

Kata Kunci: Hegemoni, Wacana Keagamaan, NU, Muhammadiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah republik ini, organisasi keagamaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk serta mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Indonesia. Organisasi-organisasi keagamaan seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah dan organisasi lainnya telah memberikan banyak kontribusi dan pengaruhnya yang sangat luas di Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, organisasi keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah, dua organisasi terbesar yang lahir di awal abad ke-20, ikut berperan dalam perjuangan mengusir penjajah penjajah. Para tokoh dari kedua organisasi juga terlibat dalam gerakan rakyat serta mempersiapkan kemerdekaan RI. Salah satu contoh adalah *resolusi jihad* pada tanggal 22 Oktober 1945 yang diserukan oleh tokoh besar ulama NU, KH. Hasyim Asyari untuk melawan tentara Belanda di Surabaya. Mereka melakukan perjuangan melawan penjajah dengan membentuk *hizbullah* (tentara Allah) dan kemudian *sabilillah*, sebuah kelompok militer kemerdekaan yang di dalamnya terdapat banyak kader NU dan Muhammadiyah.¹

Pasca perjuangan kemerdekaan tahun 1945, kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional juga sangatlah besar. Banyak tokoh dari NU dan Muhammadiyah, seperti KH. Abdul Wahid Hasyim -anggota BPUPKI dan menteri Agama era presiden Soekarno-, KH. Zainul Arifin -ketua DPR-GR-, dan KH. Idham Chalid -wakil perdana menteri di kabinet Ali Sastroamidjojo II- berperan dalam perumusan konstitusi dan tata pemerintahan

¹ Miftahuddin, *dkk.*, "Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan menuju Kemerdekaan sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)", Laporan Penelitian Payung Fakultas Ilmu Sosial UNY, Yogyakarta: UNY Press, 2012, hlm. 5

Indonesia di awal kemerdekaannya.² Selain itu, banyak tokoh Muhammadiyah seperti KH. Ahmad Dahlan yang berperan besar dalam bidang pendidikan, Kyai Mas Mansur -salah satu tokoh empat serangkai-, Ki Bagus Hadikusumo -tokoh perumus UUD Tahun 1945- telah memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia di awal kemerdekaan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Latar belakang sejarah dan politik di ataslah yang kemudian menjadikan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah mampu masuk dan diterima oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia.

Peran NU dan Muhammadiyah di Indonesia tidaklah berhenti di masa awal kemerdekaan, akan tetapi masih terus ada hingga sampai saat ini. Hampir tidak bisa dihitung dengan angka, banyak masjid, mushola, pondok pesantren, pendidikan formal umum dan keagamaan bahkan perguruan tinggi didirikan dan dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut. Tidak hanya kontribusi dalam dunia keagamaan dan pendidikan, mereka juga berperan dalam bidang sosial lainnya, seperti kesehatan (klinik, rumah sakit, panti asuhan) dan bidang ekonomi (pengelolaan zakat, wakaf, amal, dan shadaqah umat.³

Menguatnya dominasi gagasan NU dan Muhammadiyah, selain didukung oleh akar dan sejarah yang kuat dalam masyarakat Indonesia, juga dipengaruhi oleh kekuasaan politik di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah saat ini menempati jabatan strategis di pemerintahan Indonesia, mulai dari wakil Presiden RI, menteri, hingga jabatan politik strategi lainnya. Fakta inilah yang kemudian menjadikan erat kaitannya antara kekuasaan dan pengetahuan dalam struktur wacana yang berkembang di Indonesia. Fakta inilah dalam pandangan Foucault disebut dengan *Power and Knowledge*, dimana pengetahuan

² Ahmad Mukafi Niam, “Inilah Tokoh-tokoh NU Bergelar Pahlawan Nasional”, NU Online, diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/83084/inilah-tokoh-tokoh-nu-bergelar-pahlawan-nasional> , pada tanggal 21 Maret 2020 Pukul 15.39 WIB.

³ Imam Suprayogo, “Telaah Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan Pendidikan”, Sosial, dan Dakwah”, dalam Jurnal El-Harakah Vol. 5, No.2 (2003): 1.

yang berkembang tidak dapat dilepaskan oleh faktor kekuasaan yang mempengaruhinya.

Di dunia pendidikan, NU mempunyai lebih dari 23 ribu pesantren yang berafiliasi dengan NU, dan sekitar 48 ribu lembaga pendidikan tingkat dasar (SD) hingga tingkat menengah atas (SMA) yang berada dibawah lembaga Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, lembaga otonom yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Hal ini juga didukung dengan berdirinya lebih dari 31 universitas NU dalam sepuluh tahun terakhir.⁴ Sementara itu, pada tahun 2015 organisasi Muhammadiyah juga mempunyai 10.381 lembaga pendidikan yang terdiri dari 4623 TK/TPQ, 2.604 SD/MI; 1772 SMP/MTs, 1143 SMA sederajat, 67 pesantren dan 172 perguruan tinggi (Ilham, 2015).⁵

Faktor dominannya pengaruh NU dan Muhammadiyah di dunia pendidikan kemudian menjadikan produksi wacana keagamaan Islam didominasi oleh paham dan gagasan dari kedua organisasi besar tersebut. Tanpa mengecilkan peran dan gagasan dari organisasi selain NU dan Muhammadiyah, wacana keagamaan Islam minoritas sering kali hanya menjadi *affirmative acts* bagi kelompok mayoritas. Misalkan gagasan tentang relasi Islam dan negara. NU dan Muhammadiyah yang merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia telah lama menyepakati Pancasila sebagai landasar dasar negara ini (Wahid, 2007).

Dalam pandangan Foucault, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *The Archeology of Knowledge*, pengetahuan berkembang dari masa ke masa tidak secara evolutif, melainkan sebagai bentuk pergeseran dari suatu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lainnya yang otoritatif pada masa tertentu

⁴ Ahmad Mukafi Niam, "Secara Kuantitas Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya", NU Online diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/80195/secara-kuantitas-pendidikan-nu-tidak-ada-tandingannya> , pada tanggal 21 Maret 2020 Pukul 15.55 WIB.

⁵ Ilham, "Jumlah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Lebih dari 10 Ribu", Republika, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/02/nsgkgj361-jumlah-lembaga-pendidikan-muhammadiyah-lebih-dari-10-ribu>, pada tanggal 21 Maret 2020 Pukul 16.00 WIB.

sebagai rezim wacana.⁶ Menurut Foucault dalam Umar Kamahi, kekuasaan tidaklah dipahami sebagai suatu bentuk kepemilikan atas barang secara *powerful*, akan tetapi kekuasaan tersebar dimana-mana (*omnipresent*), struktur pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* yang mempengaruhi praktik-praktik sosial individu baik cara berpikir, berbicara maupun bertindak sebagai rezim pengetahuan.⁷ Lanjut Foucault, rezim wacana atau pengetahuan merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial, dan yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran.

Wacana dan pengetahuan erat kaitannya dengan kekuasaan, artinya ada kekuasaan yang menempel padanya, sehingga mereka akan mudah dalam menyampaikan pengetahuan secara otoritatif. Menurut Komaruddin Hidayat, wacana merupakan aktivitas berbagi atau menyampaikan pendapat atau gagasan dengan mengandalkan kemampuan pembicaraanya (Hidayat, 1996). Dalam penyampaian wacana, ada media yang digunakan yaitu bahasa. Bahasa merupakan kesepakatan sosial, sehingga dapat dikonstruksi sesuai dengan *setting* sosial tertentu.⁸ Sedangkan Menurut Stuart Hall (1992), dalam proses mediasi bahasa terdapat pertarungan sosial yang terbentuk dalam proses artikulasi dan praksis bahasa. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa wacana, sama halnya bahasa, senantiasa terlibat dalam relasi kekuasaan. Foucault menyimpulkannya sebagai elemen taktis yang beroperasi dalam relasi kekuasaan.⁹

Organisasi atau lembaga sosial keagamaan sebagai bagian dari struktur kekuasaan sosial memiliki peran yang signifikan terhadap keberlangsungan wacana di Masyarakat. Proses transfer pengetahuan dan wacana, selain dalam proses relasi

⁶ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. dari bahasa Inggris oleh Ketut Wiradyana, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, hlm. 23.

⁷ Imam Suprayogo, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, Sosial, dan Dakwah", dalam *Jurnal Al-Khitabah* Vol. 3, No. 1 (2017): 120.

⁸ Lutfi Hadi Aminudin, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi, dalam *Jurnal Kodifikasia* Vol. 12 No.1 (2018): 96.

⁹ *Ibid*,

individu, tentu melalui lembaga pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal. Hal inilah yang kemudian menjadikan lembaga pendidikan seperti kampus atau perguruan tinggi (PT) menjadi tempat yang strategis bagi ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah untuk menyebarkan dan mengembangkan gagasan dan ideologi mereka. PT menjadi hal yang penting karena disana terdapat proses pertukaran wacana dan gagasan yang didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Akses informasi dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan kampus dipandang sebagai kawah candradimuka untuk kaderisasi calon pemimpin bagi organisasi di masa depan.

Inilah yang kemudian menjadikan NU dan Muhammadiyah memilih kampus sebagai salah satu tempat untuk proses kaderisasi organisasi mereka, selain sebagai laboratorium gagasan mereka. Untuk proses kaderisasi di kampus, NU mempunyai proses pengakaderan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar (Putri) Nahdlatul Ulama atau PKPT IPNU/IPPNU yang merupakan organisasi otonom NU, atau organisasi yang terafiliasi kulturual NU seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Sedangkan Muhammadiyah mempunyai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk jenjang kaderisasi tingkat mahasiswa di PT.

Peran PT sangat strategis bagi organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadikan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah memilih kampus untuk menyebarkan gagasan dan ideologi mereka. *Pertama*, kampus sebagai tempat untuk *transfer of knowledge* dan *transfer of value*. Hal ini penting bagi mereka. Karena hanya melalui proses pendidikan dan pengajaranlah, ide dan gagasan mereka akan terus eksis dan berkembang. Kampus juga memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) nya yang akan dibutuhkan oleh organisasi.

Kedua, Kampus sebagai pusat penelitian. Kemajuan zaman yang dibarengi dengan perkembangan IPTEK menjadikan organisasi untuk senantiasa berubah dan menjadi lebih agar selaras dengan perkembangan zaman. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah juga membutuhkan teknologi untuk menjadikan mereka tetap eksis. Penelitian juga dapat menjadi jawaban atas problematika yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh cara-cara keagamaan semata.

Ketiga, pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat sejatinya adalah puncak dari pendidikan-pengajaran dan penelitian (Suryani, 2018).¹⁰ Kegiatan ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk implementasi nyata dharma PT terhadap masyarakat. Dan yang *keempat*, kampus sebagai pusat kaderisasi kepemimpinan. Kampus tentu menjadi *role model* bagi masyarakat yang menginginkan calon-calon pemuda pemimpin masa depan yang cakap secara intelektual, keagamaan, dan peka terhadap realitas sosial. Pada saat yang sama, PT juga membutuhkan legitimasi dari organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjadikan PT mereka dapat diterima dimasyarakat.

Sebagai organisasi yang sudah lama di Indonesia dan menjadi *circle of life* dari masyarakat Indonesia, latar belakang ideologi NU dan Muhammadiyah sering kali menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk menentukan referensi pilihannya, termasuk untuk menentukan PT untuk melanjutkan studi. Menurut Max Visser, perilaku pemilih atau *behavior voting* sering kali dipengaruhi oleh latar belakang ideologis mereka. Dalam hal PT, mereka cenderung memilih PT yang mempunyai kedekatan atau berafiliasi dengan ideologi NU atau Muhammadiyah, sesuai dengan keyakinan mereka. *Behavior voting* adalah tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok yang didukung oleh asal-usul, pengalaman masalah, dan motivasi umum lainnya (Visser, 1990).

¹⁰ Tatik Suryani, "Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Industri 4.0", dalam laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Madura, 2018, hlm. 3.

NU dan Muhammadiyah merupakan cerminan dan representasi dan masyarakat muslim di Indonesia. Meskipun tidak mewakili potret muslim Indonesia secara umum, akan tetapi pernyataan tersebut bisa kita simpulkan. Data *Alvara Research Center* tahun 2017 menyebutkan bahwa 50.3% (79.04 juta jiwa) penduduk muslim Indonesia mengaku berafiliasi dengan NU, dan 14.9% (22.46 juta jiwa) mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah, dan sisanya tersebar di ormas-ormas lain dan tidak berafiliasi dengan ormas manapun (Ali, 2017). Potret mayoritas inilah yang kemudian mungkin menjadikan mereka mendominasi dalam segala lini, termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam atau PTKI.

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama RI, terdapat 55 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ada di Indonesia, dengan rincian 16 Universitas, 22 Institut, dan 17 Sekolah Tinggi. Sedangkan terdapat 600 PTKI swasta yang terdiri dari 62 Institut, 534 Sekolah Tinggi, dan 84 Fakultas Agama Islam (Diktis Kemenag RI, 2019). Sebagai institusi pendidikan tinggi di bawah Kemenag RI, keberadaan PTKI sering kali menjadi tempat bagi NU dan Muhammadiyah serta ormas Islam lainnya untuk melakukan kaderisasi baik kultural-ideologis maupun struktural fungsional jabatan institusi.

Sebagai dua organisasi yang mengusung ideologi dan ajaran Islam *Wasathiyyah* atau ajaran Islam yang toleran dan moderat, NU dan Muhammadiyah kompak untuk menyebarkan Ideologi mereka di kampus-kampus PTKI. Meskipun pada titik-titik tertentu mereka mempunyai pandangan yang berbeda, mereka tak jarang bersinergi untuk menolak paham agama yang bertentangan dengan negara, radikalisme, terorisme, dan kekerasan (Rahmah, 2017).

Dalam perpektif sosiologi, Lewis A. Coser menyebutnya sebagai *fungsionalisme konflik sosial*, sebuah proses konflik yang dihubungkan dengan

bentuk kooperatif atau kerjasama.¹¹ Teori tersebut merupakan analisa Coser dalam *The Functions of Social Conflict* yang menjelaskan bahwa konflik merupakan bentuk dasar dari interaksi sosial yang dapat memunculkan kerja sama sosial baru. Lanjut Coser, konflik dalam masyarakat merupakan suatu hal normal yang dapat menguatkan struktur relasi-relasi sosial.

NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah, sejak kurun waktu tahun 1960-an, sudah mewarnai dinamika intelektual di perguruan tinggi, terutama PTKIN. Beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah yang dulunya merupakan mahasiswa PTKIN di Jawa Tengah, sekarang sudah menjadi baik pengurus organisasi maupun dosen/guru besar di beberapa PTKIN di Jawa Tengah. Terdapat 6 PTKIN yang di Jawa Tengah, yaitu UIN Walisongo Semarang, IAIN Surakarta, IAIN Kudus, IAIN Pekalongan, IAIN Salatiga, dan IAIN Purwokerto.

Sebagai PTKIN terbesar di Jawa Tengah dan berlokasi di Ibu Kota Provinsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo bisa dikatakan mempunyai pertalian yang kuat dengan NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah. Selain *background* sejarah panjang, UIN Walisongo juga berkontribusi besar atas munculnya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Tokoh seperti KH. Drs. Abu Hapsin Umar, Ph. D (ketua Tanfidziyah PW NU Jateng Periode 2014-2018) dan Drs. H. Tafsir, M. Ag (Ketua PW Muhammadiyah Jateng sekarang) dan adalah contohnya. Selain dalam hal tokoh, UIN Walisongo juga mempunyai garis pemahaman keagamaan yang sejalan dengan identitas NU dan Muhammadiyah, yaitu ajaran Islam yang toleran dan moderat (Muiz, 2019).

Produksi wacana Islam moderat yang digaungkan oleh NU dan Muhammadiyah nampaknya akan semakin kuat dengan adanya komitmen UIN Walisongo untuk menjadikan kampus tersebut sebagai pusat moderasi beragama. Hal ini tentunya menjadikan produksi wacana oleh UIN Walisongo merupakan

¹¹ Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser", dalam *Jurnal Kalam* Vol. 10 No. 2 (2016): 476.

sebuah pertarungan yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah. Dalam perspektif Foucault, ini adalah relasi kekuasaan dan pengetahuan. Ia menjelaskan bahwa adanya keinginan kekuasaan untuk mengontrol diskursus pengetahuan. Dikutip dari Arif Syafiuddin, dalam karya Foucault yang berjudul *L'Orde du Discourse*, Foucault menjelaskan bahwa penyebaran diskursus tidak bisa terbebas dari limitasi, seleksi dan kontrol dari pihak non diskursif seperti kekuasaan.¹²

Relasi yang kuat antara NU-Muhammadiyah dan UIN Walisongo kemudian menunculkan dominasi kultural dan politik struktural di UIN Walisongo. Relasi ini juga menempatkan beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah sebagai pimpinan kampus tersebut. Kondisi ini yang juga secara tidak langsung kemudian ideologi Islam *a la* NU dan Muhammadiyah menjadi *mainstream* di UIN Walsongo. NU dan Muhammadiyah menguasai 80 persen pos-pos strategis di UIN Walisongo, seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, hingga organisasi kemahasiswaan. Kedekatan antara NU dan Muhammadiyah di Jawa Tengah dengan UIN Walisongo Semarang kemudian melahirkan dominasi paham Islam *Wasathiyah*, dan secara tidak langsung adanya hegemoni wacana yang menguasai kampus tersebut.

Hegemoni dalam pandangan Gramsci sebagaimana dijelaskan oleh Roger Simon (Simon, 2004) bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni lebih merujuk pada sebuah konsensus atau persetujuan, tidak merujuk pada makna umumnya yaitu penguasaan satu bangsa atas bangsa lain. Lebih lanjut, hegemoni pada hakikatnya adalah upaya yang menggiring individu

¹² Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)", dalam Jurnal Refleksi Vol. 18 No. 2 (2018): 149.

atau kelompok agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.¹³

Menurut filsuf politik Antonio Gramsci, hegemoni bukanlah hubungan menggunakan kekuasaan, antara majikan dan buruh, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan dan ideologis.¹⁴ Kepemimpinan atau *direzione* (dalam bahasa Italia) dalam perspektif Gramsci dimaksudkan pada upaya untuk mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat. Sedangkan ideologi diartikan sebagai sesuatu yang mengikat kebudayaan, filsafat, pandangan dunia, dan konsepsi nilai yang berkembang di masyarakat. Gramsci tidak sependapat dengan Karl Marx bahwa ideologi sebagai kesadaran palsu dan sesuatu yang harus kita terima begitu saja.¹⁵ Bagi Gramsci ideologi merupakan pondasi dan berfungsi sebagai agen proses penyatuan sosial.

Dominasi NU dan Muhammadiyah dalam memproduksi wacana di kampus UIN Walisongo adalah sebuah bentuk hegemoni. Relasi kekuasaan dan pengetahuan yang berkembang di UIN Walisongo Semarang menjadikan opsi ideologi dan ajaran Islam *Wasathiyah* menjadi arus utama di kampus tersebut, sehingga segala bentuk kebijakan dan regulasi diarahkan sesuai dengan wacana yang ada. Hegemoni dikarakteristikan dalam berbagai cara yaitu, kesepakatan gambaran hidup, kuasa nilai, nalar masyarakat (*common sense*), ketentraman, dan penggunaan kekerasan (dapat berbentuk regulasi dan aturan) atas nama persetujuan.

Hegemoni wacana ini telah menciptakan distingsi antara masyarakat muslim yang superior dan inferior, dominasi kelompok tertentu, dan menjadikan doktrin lain sulit masuk di kampus. Pada akhirnya Gramsci mengajak kita untuk melihat bahwa wacana atau pengetahuan yang berkembang di UIN Walisongo bukanlah sesuatu yang netral secara moral melainkan mempunyai tujuan tertentu. Gramsci

¹³ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 121

¹⁴ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Insist, 2004, hlm. 19.

¹⁵ Rupert Woodfin dan Oscar Zarate, *Mengenal Marxisme*, Yogyakarta: Resist Book, 2008, hlm. 120.

berkesimpulan bahwa budaya sebagaimana digambarkan di atas adalah ekspresi ideologi yang didesain untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan kelompok tertentu tertentu.¹⁶

Pada saat yang sama, NU dan Muhammadiyah juga membutuhkan narasi ilmiah untuk menguatkan dominasinya di masyarakat. Persamaan visi tentang ajaran Islam *Wasathiyah* kemudian memunculkan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Legitimasi merupakan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan kebijakan politik. Gaetano Mosca dalam Haryanto menjelaskan bahwa pengakuan terhadap elit yang memiliki legitimasi adalah terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa *'the rullers'* (pemimpin atau penguasa) dipatuhi kepemimpinannya.¹⁷ Hubungan ini bisa kita lihat dari produk-produk riset ilmiah dan pandangan keagamaan yang dihasilkan oleh UIN Walisongo.

Selain legitimasi ilmiah, konteks hegemoni wacana tentunya membutuhkan legitimasi ideologi. Legitimasi ideologi adalah pengakuan masyarakat terhadap pemimpin dengan kesamaan ideologi yang dianut dan diharapkan pemimpin dapat menjalankan ideologi tersebut.¹⁸ Dengan hal ini, kekuasaan akan mendapatkan wewenang dan legitimasi dari masyarakat.¹⁹ Dalam praktik relasi tersebut, mengutip teori hubungan antara agama dan negara atau kekuasaan, hubungan NU-Muhammadiyah dan UIN Walisongo adalah hubungan yang *integrated*, atau penyatuan. Penyatuan di sini artinya adalah kepentingan produksi wacana NU dan Muhammadiyah didukung oleh kebijakan-kebijakan kampus, sehingga muncul simbiosis yang saling menguntungkan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁷ Haryanto, *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2005, hlm. 145.

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 97.

¹⁹ Miriam Budiarjo *dkk*, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 15.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya memfokuskan diri pada bentuk simbiosis mutualisme antara NU-Muhammadiyah Jawa Tengah dengan UIN Walisongo, serta bagaimana dampak konstelasi politik antara NU-Muhammadiyah di UIN Walisongo dalam membentuk hegemoni wacana. Maka dari itu judul dalam penelitian ini adalah *Hegemoni Wacana Keagamaan di UIN Walisongo (Analisis Simbiosis Mutualisme Politik NU-Muhammadiyah Jawa Tengah di UIN Walisongo)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai fokus dalam pengidentifikasian adalah

1. Bagaimana bentuk simbiosis mutualisme atas relasi NU-Muhammadiyah Jawa Tengah dengan UIN Walisongo dalam membentuk hegemoni Wacana di UIN Walisongo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada latar belakang di atas adalah

- a. Untuk menjelaskan bentuk simbiosis mutualisme atau relasi NU-Muhammadiyah Jawa Tengah dengan UIN Walisongo;
- b. Untuk menjelaskan dampak konstelasi politik antara NU-Muhammadiyah di UIN Walisongo dalam membentuk hegemoni Wacana.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan akan kajian filsafat kontemporer, terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa atas pengetahuan dalam pembentukan hegemoni wacana. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian filsafat dan pemikiran yang konsen pada isu-isu filsafat politik dan analisa wacana.

b. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada masyarakat, sehingga dapat bermanfaat dalam praktik kehidupan keagamaan. Memberikan alternatif dalam pemikiran kritis, upaya wacana kritis kontemporer, dan memperkaya khazanah pemikiran dan wacana filsafat kontemporer.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada latar belakang, tujuan dan signifikansi penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian dan buku yang membahas hegemoni wacana dan atau teori hegemoni Gramsci, dan akan peneliti sampaikan perbedaan antara tema penelitian ini dengan tema penelitian-penelitian yang lainnya

1. *Pijar-pijar Pemikiran Gramsci*, sebuah buku karya A. Pozzolini yang diterjemahkan oleh Eko PD, (2006). Dalam buku ini, penulis mengungkapkan bahwa karya-karya yang membahas pemikiran Gramsci masih sangat sedikit. Akan tetapi hal ini lebih baik daripada dua puluh tahun yang lalu, ketika studi-studi tentang Gramsci belum ada. Dalam buku tersebut, Gramsci mengungkapkan bahwa kapitalisme tak bisa ditolerir, dan kapitalisme harus dihilangkan guna menegakkan sosialisme di atasnya. Penulis menjelaskan secara sistematis dan lengkap pemikiran Gramsci, bagaimana mewujudkan masyarakat sosialis, dan tahap-tahap yang harus dilalui guna mewujudkannya. Penulis juga menjelaskan upaya Gramsci dalam melakukan gerakan sosialis untuk meruntuhkan dominasi kapitalisme di Eropa pada saat itu.
2. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, karya Nezar Patria dan Andi Arief, (1999). Buku yang secara ringkas menerangkan tentang hegemoni yang dilakukan oleh negara, baik lewat jalur ideologi maupun dominasi. Nezar dan Andi mengawali pembahasan ini yakni dengan Pandangan Gramsci yang menolak determinisme materialisme Marx ini tentang Revolusi proletar. Gramsci menyatakan bahwa keadaan di Eropa berbeda

dengan di Rusia, masyarakat buruh di Eropa sulit untuk digerakan dalam revolusi, kelompok borjuis telah berhasil memanipulasi kesadaran palsu para buruh, sehingga mereka kehilangan militansi revolusionernya. Peneliti secara ringkas menjelaskan bahwa masyarakat Eropa pada saat itu tengah mengalami fase hegemoni oleh negara, baik melalui jalur kepemimpinan dan konsensus, atau melalui jalur dominasi dan kekerasan. Dalam upaya merebut hegemoni negara, diperlukan sebuah revolusi moral dan intelektual oleh kelompok yang masuk dalam gerakan sosial. Yaitu kelompok intelektual organik. Kelompok organik harus mampu mengakomodir semua kepentingan, termasuk kepentingan penguasa alat produksi. Akhir dari evaluasi kritis penulis terhadap konsep hegemoni Gramsci yaitu hegemoni Gramscian adalah hegemoni yang tanpa kekerasan. Hegemoni dimana masyarakat memberikan persetujuannya kepada penguasa tanpa harus melalui kekerasan. Hegemoni berbeda dengan dominasi politik, besarnya resistensi terhadap penguasa berarti merosotnya cengkeraman dalam mempengaruhi masyarakat.

3. *Hegemoni Ideologi Demokrasi Liberal Amerika Serikat dan Wacana Global War on Terror dalam Media Massa (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Aksi Pembunuhan Usamah bin Ladin oleh Militer AS dalam Pemberitaan Kompas)*, karya Mohammad Rinaldi dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, (2011). Skripsi tersebut membahas tentang kontestasi yang menimbulkan hegemoni di media massa. Dalam penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa ada keterlibatan hegemoni ideologi liberal AS terhadap pembentukan wacana oleh Kompas terhadap pemberitaan tentang pembunuhan Usamah bin Ladin oleh tentara AS. Dampak dari terhegemoninya Harian Kompas yaitu pemberitaan terkait kasus pembunuhan Usamah bin Ladin sarat akan wacana *War on Terror* yang biasa digunakan oleh AS. Konstruksi yang dibangun dalam berita tersebut menempatkan AS di pihak yang benar, dan Usamah digambarkan sebagai teroris yang kejam dan berbahaya.

Dalam wacana *War on Terror*, Kompas cenderung hanya menjadi corong dari AS untuk melegitimasi bahwa AS adalah negara yang superior dan berjasa bagi keamanan dunia.

4. *Realitas Petani dan Organisasi Petani di Media Massa: Hegemoni Negara dalam Wacana Media*, sebuah tesis karya Hendra Harahap dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, (2000). Karya ilmiah ini berusaha untuk menganalisa hegemoni ideologis yang dilakukan oleh negara melalui media massa terhadap pemberitaan petani dan organisasi. Sebuah riset di awal tahun 2000-an telah jelas menggambarkan bagaimana media dalam memberitakan petani dan organisasi petani dengan cara dan perspektif rezim orde baru yang totaliter. Dengan cara yang khas, yaitu dengan menggunakan term anti komunis dan segala pirantinya. Sebagai buah dari rezim totaliter yang berkuasa selama 32 tahun, nampaknya media massa di awal orde reformasi pun masih terpengaruh oleh doktrin dan hegemoni rezim korup tersebut. Peneliti dalam tesis tersebut menjelaskan bahwa negara dan media dalam memproduksi wacana masih melihat petani sebagai kelompok masyarakat yang tidak maju, emosional, tidak logis, dan tidak berpendidikan, sebuah pandangan feodal warisan orde baru. Selanjutnya pemerintah dan media masih melihat aksi massa yang dilakukan oleh petani dan organisasi petani identik dengan komunis, penuh kepentingan, dan mengganggu kepentingan publik (kemacetan, dan sebagainya). Tuntutan petani terkait reformasi agraria selalu diidentikan dengan bahaya laten komunis, dan menjadikan kelompok petani sebagai bagian dari komunias. Hegemoni wacana akan unifikasi pemahaman akan komunis oleh pemerintah menjadika kelompok petani menjadi kelompok yang terdominasi, sehingga wacana yang berkembang terkait perjuangan petani hanya dihasilkan oleh kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian di atas, relasi kekuasaan dan pengetahuan dapat memunculkan hegemoni produksi wacana, sebuah keadaan dimana wacana yang berkembang didominasi dan diproduksi oleh kekuasaan yang ada. Dalam hal ini, analisis simbiosis mutualisme antar kekuasaan dapat digunakan untuk melihat proses terjadinya hegemoni wacana keagamaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dan analisis. Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara yaitu peneliti mengumpulkan data dari beberapa literatur dan kemudian menganalisisnya.²⁰ Untuk menciptakan penelitian yang berkualitas, maka penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data secara lengkap saja (data primer dan sekunder),²¹ akan tetapi juga menyiapkan kerangka penelitian serta memperdalam kajian teoritis dan metodologi analisis.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam bukunya yang berjudul *pengantar penelitian ilmiah dasar*,²² Wiranto Surahmat membedakan sumber data (menurut sifatnya) menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berupa data fakta langsung dari sumber pertama.²³ Sumber data yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian. Sumber data primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah

²⁰ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, hlm. 14

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 21-22

²² Wiranto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 2004, hlm. 134.

²³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm. 5.

buku-buku yang berkaitan dengan hegemoni wacana, relasi kekuasaan dan pengetahuan, serta teori hegemoni Antonio Gramsci. Buku-buku tersebut adalah buku *Catatan-catatan dari Penjara* karya Antonio Gramsci (2013), buku *Arkeologi Pengetahuan, dan Kuasa* karya Michel Foucault (2012), data organisasi UIN Walisongo Semarang periode 2016-2019 dan 2019-2023.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan literatur pendukung dalam penelitian ini.²⁴ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, hasil penelitian, website yang membahas tentang hegemoni wacana, dan wacana yang berkembang di UIN Walisongo Semarang.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa konten untuk mengevaluasi pernyataan dan pemahaman dari konsep. Yaitu setelah semua data terkumpul, data akan diperinci sesuai dengan objek penelitian.²⁵ Pertama, peneliti akan menjelaskan teori hegemoni Gramsci Kemudian peneliti akan menjelaskan hegemoni wacana. Selanjutnya peneliti akan membahas sumbangsih teori hegemoni Gramsci dalam memandang hegemoni wacana. Pada akhirnya peneliti akan menyimpulkan adanya keterkaitan simbiosis NU-Muhammadiyah dan UIN Walisongo dan hegemoni wacana yang diproduksi UIN Walisongo. Kerangka dalam analisa tentunya akan dilakukan secara sistematis, rinci, mendalam dan kritis dalam penyusunannya.

²⁴ Imam Barnadib, *Arti dan Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: FIP IKIP, 1982, hlm. 55

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 59

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti secara umum akan menjelaskan kerangka penulisan penelitian ke dalam lima bagian sebagai satu kesatuan yang utuh. Kerangka penulisan dalam penelitian ini yaitu

BAB I ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Hal ini bertujuan untuk membantu pembaca untuk memahami tujuan dari penelitian ini.

Selanjutnya adalah BAB II. Merujuk pada bagian sebelumnya tentang latar belakang dan rumusan masalah, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan peran NU dan Muhammadiyah dalam pembentukan wacana di perguruan tinggi. Hal tersebut akan menjadi sebuah tahapan yang sangat penting untuk menjadi sebuah penjelasan awal dalam penelitian ini. Struktur dalam bagian ini meliputi pengertian organisasi sosial keagamaan, peran organisasi sosial keagamaan dalam *Empowering Society*, organisasi sosial keagamaan NU dan Muhammadiyah dalam pembentukan wacana, peran perguruan tinggi dalam memproduksi wacana, dan Hegemoni Wacana dalam Masyarakat.

Selanjutnya pada BAB III peneliti akan menjelaskan tentang sinergitas NU dan Muhammadiyah dengan UIN Walisongo. Pembahasan ini meliputi sejarah UIN Walisongo, kondisi lembaga sosial keagamaan civitas akademik UIN Walisongo, bentuk aktifitas keagamaan UIN Walisongo, prta politik pimpinan UIN Walisongo, serta narasi keagamaan yang berkembang di UIN Walisongo.

Selanjutnya adalah BAB IV. Pada BAB ini pembahasan tentang analisa simbiosis mutualisme politik NU dan Muhammadiyah dalam membentuk hegemoni wacana di UIN Walisongo

BAB V adalah bagian terakhir dalam penelitian ini. Pada BAB ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
PERAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN NU DAN
MUHAMMADIYAH DALAM PEMBENTUKAN WACANA DI
PERGURUAN TINGGI

A. Pengertian Organisasi Sosial Keagamaan

Dalam negara demokrasi, keberadaan organisasi sosial merupakan sesuatu yang wajar adanya. Keberadaan mereka, selain sebagai kontrol kekuasaan, juga berperan dalam mendukung program pemerintah. Organisasi adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur dan terbentuk untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Menurut W. Hamilton (Abdulsyani, 1994), bahwa organisasi merupakan tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi. Soerjono Soekanto dalam buku yang sama menyimpulkan bahwa organisasi sosial, dalam sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, adalah suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.¹

Institusi sosial dalam konsep negara modern dapat ditelusuri dari karya-karya filsafat barat seperti Cicero dan filsuf Roma lainnya.² Ide masyarakat sipil modern muncul pada zaman pencerahan di Skotlandia dan Eropa daratan pada akhir abad ke-18. Sejumlah ahli teori politik, seperti Thomas Paine dan George Hegel,

¹ Abdulsyani, *Sosiologi; Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 76.

² Yusa Djuandi..dkk, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol.3, No.2 (2018), hlm. 110.

mengembangkan gagasan masyarakat sipil sebagai domain yang sejajar tetapi terpisah dari negara-negara tempat warga bermitra sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Pemikiran baru ini mencerminkan perubahan realitas ekonomi: bangkitnya kepemilikan pribadi, persaingan pasar, dan borjuis. Hal ini tumbuh dari meningkatnya permintaan akan kebebasan, seperti yang dimanifestasikan dalam revolusi Amerika Serikat dan Perancis.³

Lembaga, institusi, atau organisasi sosial termasuk dalam kelompok masyarakat sipil atau masyarakat madani (*civil society*).⁴ Kecenderungan politik global yang mengarah pada proses demokratisasi di segala sektor kekuasaan menjadikan ruang bagi *civil society* semakin terbuka lebar. Dalam perkembangan dunia modern, konsep *civil society* dihubungkan dengan konsep *governance*, dimana konsep tersebut juga bisa diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik (Sumarto, 2004). Di dalam *governance* sendiri terdapat 3 (tiga) aktor yang sangat berperan di dalam dinamika *governance* sendiri, aktor tersebut adalah negara, pasar dan *civil society*.

Pengertian negara adalah organisasi yang memiliki legitimasi dan memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak rakyatnya. Pengertian pasar dalam lingkup *governance* adalah sebuah sistem sosial, dimana didalamnya individu-individu mengejar kemakmuran masing-masing dengan saling mempertukarkan barang/jasa bilamana pertukaran itu dianggap menguntungkan oleh masing-masing individu yang terlibat.

Dalam model pasar, individu-individu bertindak hanya untuk memaksimalkan kepentingan (*self-interest*) mereka masing-masing. Di sini, kepentingan berarti kemakmuran masing-masing individu, tetapi masing-masing individu ini memiliki definisinya sendiri tentang apa itu kemakmuran. Sedangkan

³ Carothers, T. dan Barndt, W, *Civil society*, dalam Jurnal Foreign Policy, No. 117, 18-29.

<http://doi.org/10.2307/1149558> .

⁴ Yusa Djuandi..dkk, *Op.Cit.*

civil society sering dikaitkan dengan masyarakat madani yaitu masyarakat yang beradab dan demokratis. Adanya *civil society* yang terlembaga atau sering disebut sebagai *Non-Government Organisation* (NGO) memberikan angin segar kepada masyarakat untuk bisa menjadi penyeimbang atas hegemoni negara dan pasar.

Masyarakat sipil dapat mencakup banyak jenis aktor: institusi akademik, forum bisnis, lingkaran klan dan kekeluargaan, pendukung konsumen, kerjasama pembangunan lingkungan hidup, gerakan lingkungan, lobi etnis, asosiasi berbasis agama, pejuang hak asasi manusia, serikat pekerja, kelompok masyarakat lokal, gerakan perdamaian, yayasan filantropi, badan profesional, organisasi bantuan, lembaga pemikir, jaringan perempuan, asosiasi pemuda, dan lebih. Secara khusus, konsepsi masyarakat sipil ini membentang jauh lebih luas daripada LSM atau NGO yang secara formal terorganisir, terdaftar secara resmi, dan dikelola secara profesional.⁵

B. Peran Lembaga Sosial Keagamaan dalam *Empowering Society*

Ada banyak defenisi yang telah dirumuskan terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau *social empowerment*. Menurut Harry Hikmat dalam Eko Prasodjo (2004), pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata tetapi juga kolektif. Sedangkan menurut Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai sebuah proses merupakan salah satu proses yang.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 111.

⁶ Eko Prasodjo, "People and Society Empowerment; Perspektif Membangun Partisipasi Publik" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 2, (2004), hlm. 12.

Dari dua definisi tersebut maka makna pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Makna yang kedua adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu diartikan sebagai *enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability* (kemampuan), *capacity* (daya tampung), dan *capability* (kecakapan) masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Civil society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didambakan oleh negara demokrasi. *Civil society* digambar sebagai sebuah konsep dimana adanya ruang yang cukup luas untuk individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan sangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara. *Civil society* juga diartikan dengan keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang.

A. Gaffar (2002) menjelaskan *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki adab atau kesopanan (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab. Inilah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empirik. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program-program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut.

Kegagalan program pemerintah di bidang pemberdayaan inilah pada akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul satu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Dalam konteks inilah Peran Ormas menjadi penting.

Sebagai sebuah organisasi masyarakat yang mempunyai agenda sosial yang jelas dan dilindungi oleh konstitusi, pemerintah juga didorong untuk memperkuat ormas dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada tujuan ormas menurut UU No. 17 Tahun 2013, tujuan ormas salah satunya yaitu meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.⁷ Pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam peranannya di masyarakat tentu sudah sangat besar, salah satunya adalah keberadaan pondok pesantren (ponpes). Sebagai institusi pendidikan tertua di pulau Jawa, pesantren telah menjadi pusat pembelajaran Islam tradisional terpenting di Indonesia. Dalam perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, menurut Marzuki Wahid, pesantren sangat percaya diri dan punya daya tahan yang tinggi dalam menghadapi tantangan dari luar. Pesantren sebagai lembaga tradisional, atas tradisionalismenya, ia mampu bertahan dari gempuran modernisme dan kemajuan teknologi.⁸ Pesantren juga telah mampu mengembangkan sektor-sektor pemberdayaan sektor ekonomi seperti koperasi, budidaya ikan dan ternak, perkebunan, sektor sosial seperti pendidikan, sosialisasi bersama masyarakat, dan sektor budaya seperti kesenian, beladiri, dan tradisi

⁷ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁸ Marzuki Wahid, *dkk*, Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 145

lainnya. Wahid menambahkan bahwa adanya sosok sentral dan kharismatik yang diperankan oleh Kyai mampu memberikan pengaruh tentang pijakan moral dan keimanan. Dengan kata lain, agar *civil society* bisa terwujud, diperlukan pijakan atau landasan imaniah dan komitmen moral dari tiap warganya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, egaliter, toleran, inklusif dan menghargai pluralitas.⁹

C. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Pembentukan Wacana

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil, organisasi sosial keagamaan NU dan Muhammadiyah tentu mempunyai visi, misi dan tujuan yang berbeda dari kelompok masyarakat sipil lainnya, seperti serikat pekerja, pejuang HAM, atau yayasan pendidikan. Menurut Imam Suprayogo, sumber kekuatan dari organisasi sosial keagamaan adalah semangat keberagaman itu sendiri.¹⁰ Semangat tersebut kemudian melahirkan solidaritas sosial dan pengorbanan yang tinggi bagi organisasi. Kekuatan itulah yang menjadikan baik NU maupun Muhammadiyah mampu melahirkan gerakan di berbagai bidang kehidupan. Berdirinya sekolah, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, panti asuhan, dan tempat ibadah yang berjumlah amat besar di berbagai wilayah adalah merupakan buah dari kekuatan yang bersumber dari keberagaman itu.

Baik Muhammadiyah maupun NU, dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, didirikan untuk menyampaikan pesan dan ajaran agama Islam. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912.¹¹ Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik. Ahmad Dahlan pernah belajar di Mekah dan membaca majalah *al-Manar*. Melalui perantara KH. Bakir, ia berkenalan dengan Rasyid Ridha dan bertukar pikiran sehingga cita-cita pembaharuan meresap

⁹ Wahyuddin Halim, "Peran Pesantren dalam Wacana dan Pemberdayaan masyarakat madani" dalam *Jurnal Akademika*, Vol.22, No.2 (2017), hlm. 203.

¹⁰ Imam Suprayogo, *Op. Cit.*, hlm.4.

¹¹ Ahmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Moderisme Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 129.

dalam sanubarinya. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan yang bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran Allah yang sebenarnya.¹²

Nahdatul Ulama (NU) lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme. Pembentukan NU merupakan upaya pengorganisasian peran para ulama, dan pesantren yang sudah ada sebelumnya. Agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan dan diluaskan jangkauannya. NU menilai tidak semua tradisi buruk, usang, tidak mempunyai relevansi kekinian bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Penegasan atas pemihakan terhadap “warisan” masa lalu. Islam diwujudkan dalam sikap bermazhab yang menjadi tipikal NU dalam memahami maksud al-Qur’an dan hadits.¹³

Wacana atau gagasan yang diperjuangkan oleh NU dan Muhammadiyah adalah perjuangan untuk mewujudkan Islam yang moderat, toleran, dan mampu berinteraksi dengan baik dengan budaya. Kita sebut sebagai moderat Islam atau Islam *Wasathiyah*. Ajaran Islam *Wasathiyah* atau moderatisme Islam yang ditampilkan oleh NU dan Muhammadiyah merupakan wacana, diskursus atau pengetahuan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Emile Durkheim menyebutnya sebagai solidaritas mekanik, yaitu masyarakat bergerak atas dasar sentimen emosi dan keyakinan ideologis.¹⁴ Masyarakat mampu digerakan menggunakan satu kesepakatan ideologis yang mereka yakini. Secara epistemologis, ajaran Islam dalam pandangan NU dan Muhammadiyah dijelaskan dalam hal-hal berikut.

¹² Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin “Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Imam, Vol.1, No.1 (2018), hlm. 10.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Imam Suprayogo, *Op. Cit*, hlm. 5.

Di bidang teologi, dua organisasi ini mengklaim sebagai penganut *ahlussunah wal jama'ah* (aswaja). Dalam kajian aliran ilmu kalam (teologi Islam), aswaja dikenal sebagai paham yang berdiri di antara dua ekstremitas rasionalis-liberal dan kelompok tradisionalis-literalis. Sementara itu, dalam bidang fiqh, jika NU lebih memilih mazhab Syafi'i sebagai kiblat rujukan doktrin keagamaannya, maka Muhammadiyah lebih memilih untuk tidak memihak kepada salah satu mazhab fiqh yang ada, tetapi langsung dari sumbernya yaitu al-Quran dan al-Sunah.

Sikap *tawasuth* atau moderat yang diperlihatkan Muhammadiyah dan NU antara lain juga nampak dalam pandangan-pandangan politiknya. Tiga prinsip yang sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU adalah kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Tradisi memilih jalan damai dalam wacana politik NU umumnya melalui prinsip-prinsip yurisprudensi dan kaidah-kaidah yang menganjurkan minimalisasi risiko, pengutamaan asas manfaat, dan menghindari hal-hal yang ekstrem. Ketika memperbincangkan NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia yang menampilkan Islam pertengahan (*wasathiyah*) dengan visi dan misi perdamaian di atas keberagaman, maka dua prinsip yang dibawa oleh masing-masing ormas tersebut menjadi pembahasan yang penting untuk ditelaah. Dua konsep tersebut adalah Islam Nusantara yang diemban oleh NU dan Islam berkemajuan oleh Muhammadiyah.

Menurut Al-Ma'arif dalam Zainun,¹⁵ Islam Nusantara mempunyai semangat yang positif yaitu, toleransi dalam keberagaman, apresiasi terhadap tradisi yang baik, dan elastis (tidak kaku) dalam memahami teks agama. Di sisi lain, Muhammadiyah mengusung konsep Islam berkemajuan, yang berpandangan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam mengemban misi dakwah dan *tajdid* atau pembaharuan untuk mewujudkan masyarakat Islam maju dan sesuai dengan al-Quran dan al-Sunah. Menurut Buya Syafi'i Ma'arif konsep Islam yang kemudian

¹⁵ Zainun Wafiqatun Niam, "Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam *Rahmatan Lil'alam*: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia" dalam Jurnal PALITA, Vol.4, No.2 (2019), hlm. 100

dikatakan sebagai Islam berkemajuan khususnya di Indonesia haruslah dibingkai dalam ke-Indonesiaan dan kemanusiaan. Islam lahir dan berkembang di Indonesia sepenuhnya dalam darah dan daging sejarah serta tidak dalam kepasifan budaya. Sebagai agama sejarah, Islam telah, sedang, dan akan terus bergumul dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Karena tujuan Islam adalah mengarahkan perubahan itu agar tidak tergelincir dari jalan lurus esensi ke-Islaman yaitu peradaban, kemanusiaan, dan keadilan. Islam yang tidak berwatak keras dan kasar, teror dan radikal.¹⁶

Dalam menganalisis pembentukan wacana Islam *Wasathiyah* oleh NU dan Muhammadiyah, peneliti menggunakan analisa wacana post-strukturalisme Michel Foucault. Penggunaan pemikiran Foucault untuk menganalisa fenomena ini setidaknya dipengaruhi oleh fakta bahwa proses pembentukan wacana oleh NU dan Muhammadiyah di UIN Walisongo dibentuk oleh adanya relasi kekuasaan yang menyertainya. Analisis post-strukturalisme Foucault menjadi sangat relevan dalam melihat fakta ini.

Istilah wacana atau *discourse* dipopulerkan oleh Foucault dan merupakan konsep penting dalam pemikirannya.¹⁷ Wacana dalam perspektif Foucault bukanlah sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, melainkan sesuatu yang memproduksi sesuatu yang lain. Oleh karena itu, dalam analisis wacana hendaknya mempertimbangkan peristiwa bahasa dengan melihat bahasa dari dua segi yaitu segi arti dan referensi. Dalam sebuah wacana terdapat pernyataan (proposisi) yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu (arti/makna), akan tetapi juga mengatakan sesuatu tentang sesuatu (referensi). Referensi inilah yang memperluas dimensi makna bahasa dan memengaruhi sistem sosial budaya sampai pikiran manusia.

¹⁶ Muthoifin, “Islam Berkemajuan Perspektif Ahmad Syafi’i Ma’arif: Studi Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan”, dari Jurnal Wahana Akademika, Vol. 4, No. 1 (2017).

¹⁷ Akhyar Yusuf, *Politik Pengetahuan, Episteme, dan Kematian Manusia: Refleksi Pemikiran Posmodernisme Michel Foucault*, Materi Kuliah Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009.

Oleh sebab itulah, maka wacana harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh. Foucault mengatakan bahwa sementara wacana dikonstruksi oleh bentuk diskursif atau *episteme*.

Dipengaruhi oleh analisis genealogi Nietzsche, Foucault menolak konsep kontinuitas sejarah. Foucault melihat bahwa pengetahuan tidak terjadi dalam satu kesatuan periode sejarah. Artinya bahwa wacana bukanlah satu kesatuan pengetahuan yang tercipta oleh zaman sebelumnya. Pengetahuan muncul dalam fragmen atau kondisi tertentu (dalam istilah Foucault: diskontinu) yang dipengaruhi oleh faktor dominan yang menguasainya.

Pengetahuan dan kekuasaan adalah konsep Foucault yang menarik karena Foucault mendefinisikan kuasa berbeda dengan para ahli yang lain. Kuasa oleh Foucault tidak diartikan “kepemilikan”. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup tertentu di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain.¹⁸ Pemikiran mengenai kuasa Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche yang disebut olehnya sebagai seorang filosof kekuasaan (*philosopher of power*). Akan tetapi Foucault memiliki kekhasan yaitu dia senantiasa selalu mengaitkan kuasa dan pengetahuan. Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakumulasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi untuk mengetahui bahwa untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan.¹⁹ Karena setiap kekuasaan disusun dan dimapankan oleh pengetahuan dan wacana tertentu.

Oleh karena itu, dalam menentukan kebenaran bagi Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang abstrak dan datang begitu saja. Kebenaran menurut Foucault diproduksi oleh setiap kekuasaan. Foucault dalam bukunya *Discipline and Punish* menjelaskan bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Kekuasaan dan

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 65

¹⁹ *Ibid*, hlm. 66.

pengetahuan secara langsung saling mempengaruhi. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa ada konstitusi korelatif dari bidang pengetahuannya.²⁰

Dalam perspektif Foucault, Islam moderat yang menjadi nilai perjuangan NU dan Muhammadiyah dapat berkembang dan menyebar sangat cepat setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor politik dan faktor sosial. Meskipun NU dan Muhammadiyah adalah organisasi yang menyatakan diri sebagai organisasi dakwah Islam, perkembangan NU dan Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari kekuatan politik yang ada.

Meskipun NU dan Muhammadiyah tidak menyatakan diri secara langsung terlibat dalam politik praktis, akan tetapi mereka membebaskan bagi kader dan anggotanya untuk terlibat dalam politik.²¹ Sikap mereka yang moderat dalam sikap politiknya menjadikan mereka lebih akomodatif dengan kekuasaan. Mereka lebih memilih jalur politik yang minim resiko, mengutamakan manfaat, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang ekstrem. Perjuangan NU dan Muhammadiyah juga didukung oleh banyak kader, anggota dan simpatisan yang menjabat di pemerintahan pusat dan daerah. Pasca Pemilu 2019, mereka mempunyai representasi mulai dari Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati.

Dalam sejarah NU, ia pernah menjadi partai politik pada tahun 1952-1971 sebelum pada akhirnya kembali ke *khittah* NU sebagai organisasi dakwah pada Muktamar Situbondo 1984. Muhammadiyah pun demikian. Haidar Nashir menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan kekuatan politik mana pun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut *khittah* (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Pembuktian pada *khittah* ini terlihat dari: *Khittah Palembang*

²⁰ Michel Foucault, *Discipline and Punish*, Harmondsworth: Penguin, 1979, hlm. 27.

²¹ Eddy Flo, "Ketua Umum PBNU: Sekali Lagi, NU Bukan Partai Politik", diakses dari merahputih.com pada 28 Maret 2020, pukul 12.57 WIB, <https://merahputih.com/post/read/ketua-umum-pbnu-sekali-lagi-nu-bukan-partai-politik>

(1956-1959), khittah Ponorogo (1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Denpasar (2002).²²

Di era demokrasi modern, upaya NU dan Muhammadiyah dalam menyebarkan ideologi Islam moderat akan berkompetisi dengan ideologi lainnya di ruang publik, ruang di mana masyarakat dalam bersaing secara bebas. Ruang ini yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan yang menghubungkan kepentingan pribadi, kelompok dan negara. Ruang publik juga dapat dijadikan sebagai medan diskursif partisipatif masyarakat dan negara untuk memperjuangkan kepentingan. Menurut Bourdieu, arena didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah fungsinya dan relasi-relasi kuasanya.

D. Peran Perguruan Tinggi dalam Memproduksi Wacana

Perguruan Tinggi (PT) atau kampus mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Keberadaan PT sangatlah dibutuhkan kontribusinya untuk memberikan solusi nyata di masyarakat, mulai dari problematika sains dan teknologi hingga problematika sosial humaniora. Sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran tingkat tinggi, kampus merupakan tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang nantinya akan diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah dituntut untuk berperan secara aktif positif dalam memecahkan permasalahan (*problem solver*) yang dihadapi masyarakat dengan menghasilkan ilmu yang siap pakai, dalam arti penemu masalah (*problem finder*). Dengan demikian ilmu yang diperoleh melalui penelitian dapat digunakan untuk menerangkan (*to explain*), meramalkan (*to predict*) atau peristiwa di dalam kehidupan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggi haruslah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian tangguh,

²² Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, hlm. 15.

berkemampuan unggul, cerdas, kreatif sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi globalisasi.

Oleh karena itu keberadaan perguruan tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Proses perubahan sosial (*social change*) yang cepat di masyarakat menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata. Peran perguruan tinggi tertuang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan dharma pengabdian masyarakat. 3 (tiga) dharma atau bakti ini merupakan proses yang saling berkaitan satu sama lain.

Pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Proses ini adalah tahapan pertama yang dilakukan di perguruan tinggi. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²³

Kedua yaitu penelitian. Penelitian juga sangatlah penting bagi kemajuan perguruan tinggi, kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara. Dari penelitian dan pengembangan maka mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan teknologi pada penelitian dan pengembangan mahasiswa harus lebih cerdas, kritis dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai *agent of change*. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan penelitian dan pengembangan ini dalam suatu proses

²³ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pembelajaran untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan terdepan.

Ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi,

*pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*²⁴

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif. Pada hal ini mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwasannya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat, *agent of change* dan lainnya. Maka dari itu mahasiswa harus mengetahui porsi dari tugas mereka masing – masing dalam mengabdikan kepada masyarakat.

Dari 3 (tiga) proses tersebut, kemudian PT mampu melahirkan wacana atau pengetahuan sebagai puncak dari dharma perguruan tinggi. PT mempunyai kewajiban untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau wacana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Liang Gie (1987), Sebagai pusat penelitian ilmiah, PT harus memproduksi pengetahuan yang memenuhi kaidah ilmiah yang ada, yaitu 1) empiris, pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan; 2) sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur; 3) obyektif, ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi; 4) analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membedakan pokok-soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu; 5) verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga.

Sebagaimana dijelaskan diatas, PT mempunyai peran untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menemukan solusi atas

²⁴ *Ibid*

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan PT dalam memproduksi wacana sangatlah jelas, bagaimana PT mampu memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengembangkan wacana yang ada untuk memproduksi wacana yang baru. Proses produksi wacana atau pengetahuan oleh PT, sebagaimana dijelaskan oleh Van Melson (1985), haruslah menghasilkan pengetahuan yang logis, koheren, tanpa pamrih, universal, objektif, verifikasi, progresif, kritis, dan praktis.

E. Hegemoni Wacana dalam Masyarakat

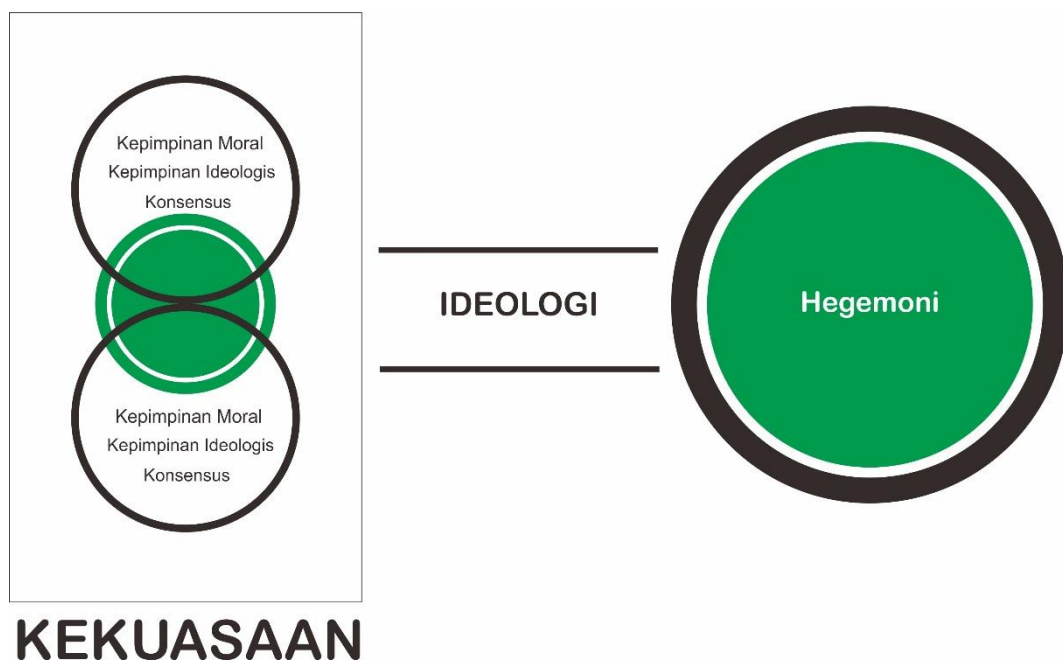
Untuk memahami wacana yang berkembang di masyarakat, satu hal yang terpenting adalah bagaimana wacana tersebut muncul dan berkembang di ruang publik, yang artinya siapapun dan kelompok manapun dapat berkompetisi di sana. Dalam perspektif Foucault, wacana atau pengetahuan yang berkembang di masyarakat erat kaitannya dengan kekuasaan yang ada di masyarakat. Konsep kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara.

Foucault mengartikan kekuasaan tidak sama dengan kekuasaan versi Marx yang menekankan penguasaan Ideologi, atau kharisma kepemimpinan ala Weber. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Wacana yang dihasilkan dari relasi pengetahuan dan kekuasaan dan telah mempengaruhi sisi ideologis dan mendominasi kelas dalam masyarakat merupakan bentuk hegemoni wacana. Adalah teori hegemoni yang diperkenalkan oleh filsuf politik Itali, yaitu Antoni Gramsci. Hegemoni diartikan sebagai dominasi satu

kelompok atau kelas dalam masyarakat yang dicapai tidak melalui kekuatan, tetapi melalui kesepakatan atau *consent*. Martin Carnoy dalam Subono (2003) menjelaskan bahwa hegemoni merupakan proses dalam *civil society* di mana fraksi dari kelas yang dominan melakukan kontrol melalui kepemimpinan moral dan intelektual.

Hegemoni dalam pandangan Gramsci sebagaimana dijelaskan oleh Roger Simon bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan dengan kepemimpinan politik dan ideologis.²⁵ Hegemoni lebih merujuk pada sebuah konsensus atau persetujuan, tidak merujuk pada makna umumnya yaitu penguasaan. Menurut Subono, jika kita menggunakan konsep hegemoni dalam konteks dominasi wacana yang berkembang, maka semangatnya adalah adanya elemen ideologi kelas yang dominan terhadap kelas-kelas yang subordinat dalam produksi wacana.²⁶ Berikut peneliti ilustrasikan proses terbentuknya hegemoni wacana



Gambar 1. Ilustrasi proses terbentuk hegemoni

²⁵ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Penerj. Kamdani dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Insist, 2004, hlm. 19

²⁶ Nur Iman Subono, “*Civil Society, Patriarki, dan Hegemoni*”, dalam *Jurnal CIVIC*, Vol. 1 No. 2, (2003), hlm. 31.

Pembicaraan terkait hegemoni wacana di masyarakat tidak dapat terjadi tanpa adanya kekuasaan yang melatarbelakanginya. Dominasi satu wacana atas wacana lainnya yang diproduksi oleh kekuasaan (dalam hal ini pemerintah, ormas, atau perguruan tinggi), selalu menempatkan wacana lain sebagai sesuatu yang asing, tidak ilmiah, bahkan merupakan sesuatu yang salah. Bentuk kekuasaan dapat berupa media massa dan lembaga pendidikan seperti sekolah, dan elemen masyarakat seperti organisasi. Akibat dikuasainya sektor media dan pusat produksi ilmu pengetahuan oleh kekuatan dominan tertentu, pemegang kuasa akan menggunakan saluran-saluran produksi wacana tersebut untuk mensosialisasikan dan melestarikan ide dan gagasan mereka.

Keterkaitan antara *civil society* (ormas, kampus) dan produksi wacana pada satu sisi, dan hegemoni pada sisi yang lain terletak pada penerimaan masyarakat secara umum terhadap ide, norma, ajaran, bahkan kebijakan yang lahir dari kelompok masyarakat tersebut yang didukung oleh kekuatan politik melalui dominasi. Produksi wacana atau pengetahuan tidak pernah terlepas dari konteks situasi dan budaya. Sebaliknya, situasi dan budaya mempengaruhi produksi wacana atau pengetahuan tersebut. Wacana bersifat konstitutif dan juga tersusun, yakni adanya hubungan dialektik antara wacana dengan dimensi-dimensi sosial yang lainnya. Oleh sebab itu, perubahan politik dapat dipahami dan dilakukan dengan produksi dan perubahan wacana atau pengetahuan.

Wacana atau pengetahuan yang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang kritis dan diterima sebagai *something given* merupakan wacana yang terhegemoni. Menurut Gramsci, suatu kelas sosial yang terhegemoni tidak hanya terdominasi dalam sektor produksi, akan tetapi berada pada titik inferior. Gramsci melihat hegemoni dalam *civil society* tidak dalam dominasi ekonomi, namun dalam dominasi politik dan kultural. Hegemoni wacana yang terjadi di dalam masyarakat berangkat dari bentuk hegemoni kepemimpinan atau konsensus dan ideologi.

Pola hubungan hegemoni yang terjadi di masyarakat dalam perspektif Gramsci dibangun oleh mekanisme konsensus. Konsensus dalam pandangan Gramsci berkaitan dengan spontanitas yang bersifat psikologis. Hal ini mencakup

pelbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Hegemoni muncul karena rasa takut, karena terbiasa, karena kesadaran, dan karena persetujuan. Bagi Gramsci, hegemoni melalui persetujuan muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Sebuah konsensus yang diterima oleh masyarakat pada dasarnya bersifat pasif, karena kemunculannya bukan sebagai keinginan kelompok yang terhegemoni. Keadaan pasif ini lebih dikarenakan bahwa masyarakat kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran mereka dalam memahami realitas.

Ada dua hal yang menurut Gramsci mengakibatkan konsensus ini memaksa masyarakat, yaitu pendidikan dan institusi kelembagaan.²⁷ Di satu sisi pendidikan yang ada tidak pernah memberikan kesempatan untuk membangun pemikiran kritis bagi masyarakat. Demikian pula yang terjadi pada mekanisme institusi dan kelembagaan. Mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi alat kepentingan kelompok penguasa untuk menentukan ideologi dalam rangka kepentingan dominasi kekuasaan.

Bagi Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide, sebagaimana masyarakat pada umumnya mengartikan ideologi. Ideologi menurut Gramscian adalah sesuatu yang mengatur manusia, memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, memperoleh kesadaran akan posisi mereka, dan sebagainya. Ideologi bukanlah fantasi yang melangit, namun terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat. Ideologi harus dipahami juga sebagai bagian dari superstruktur, ideologi harus dianalisis secara historis dengan dasar filsafat praksis.²⁸ Keberadaan ideologi dalam mempengaruhi perilaku masyarakat harus disadari bahwa ideologi mempunyai eksistensi material. Artinya ia menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang, dan masuk dalam lembaga, organisasi, dan tempat dimana praktik

²⁷ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 127.

²⁸ Antonio Gramsci, *Catatan-catatan dari Penjara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 528.

sosial berlangsung.²⁹ Semua lembaga ini memainkan peran subjek yang menyebarkan dan mempertahankan ideologi, atau dengan kata lain lembaga-lembaga tersebut mempunyai efek-efek ideologis.

Ideologi bagi Gramsci tidak dapat dinilai dari kebenaran atau kesalahannya, akan tetapi harus dinilai dari efektivitasnya. Artinya bahwa sifat dasar ideologi adalah netral dan tidak berpihak pada hal apapun. Jadi segalanya bergantung pada bagaimana ideologi itu dipahami dan dipraktikkan untuk sebuah tujuan. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa ideologi berlaku juga bagi negara maupun organisasi masyarakat sipil. Hal inilah yang menjadikan bahwa transformasi hegemonik kesadaran masyarakat haruslah bersifat moral dan intelektual, bukan dominasi, kekerasan dan paksaan.

Hegemoni ideologi terjadi ketika kelompok dominan mampu mengkonsolidir semua kepentingan, serta menemukan cara untuk mempertemukan dengan kepentingan mereka. Pertama, kelas hegemonik harus membuat konsensus agar bisa mewakili semua kelompok kekuatan sosial besar. Kedua, perjuangan ideologi ini tidak bisa terjadi dengan cepat, melainkan dibangun atas konstruksi intelektual para pemimpin politik. Perjuangan bertahap secara sosio-politis, sehingga karakter yang muncul bergantung pada hubungan pelbagai kekuatan yang ada ketika ideologi ini dibangun. Ideologi ini masuk dalam pemikiran masyarakat yang kemudian diterapkan dalam pola kehidupan mereka. Ideologi mampu mengorganisasikan massa, menciptakan area dan ruang gerak, mendapatkan wewenang penuh akan posisi masyarakat dalam berjuang.³⁰ Dua poin penting yang harus diperhatikan ketika sebuah kelas yang ingin bergerak menjadi hegemonik dengan menggunakan jalan ideologis.³¹

²⁹ Roger Simon, *Op. Cit*, hlm. 86.

³⁰ Antonio Gramsci, *Op.Cit*, hlm. 529.

³¹ Roger Simon, *Op.Cit*, hlm. 91.

BAB III

SINERGITAS NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DENGAN UIN WALISONGO

A. Sejarah dan Profil Singkat UIN Walisongo Semarang

Universitas Islam Negeri (UIN) atau sebelumnya dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Indonesia. Kampus yang terletak di kota Semarang Jawa Tengah ini merupakan kampus yang mempunyai sejarah panjang sebagai kampus Islam induk di regional Jawa Tengah. kehadiran UIN Walisongo tidak dapat dilepaskan dari munculnya kampus Islam negeri pertama kali di Indonesia. Munculnya UIN/IAIN bermula dari serangkaian proses yang berlangsung tidak kurang dari 10 tahun sebelumnya, yakni saat pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pertama kali di Indonesia.¹

PTAIN pertama terletak di Yogyakarta. Kampus ini berdiri dengan mengubah status Fakultas Agama di bawah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi PTAIN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 34 Tahun 1950. Tujuan berdirinya PTAIN ini adalah untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam yang sangat diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tentu hal ini karena penduduk beragama di Indonesia adalah mayoritas muslim, dengan prosentase lebih dari 80%. Sedangkan ADIA berdiri pada 15 Mei 1957 berdasarkan pada peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957 dan berlokasi di Jakarta. Tujuan didirikannya Akademi ini adalah untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang memiliki ijazah untuk dijadikan ahli pendidik agama di sekolah-sekolah lanjutan.

Dua institusi pendidikan agama Islam di atas adalah cikal-bakal dari berdirinya IAIN. IAIN pertama lahir dari peleburan antara PTAIN di Yogyakarta

¹ Buku Kenangan Lustrum V IAIN Walisongo, 6 April 1970-6 April 1995, hlm. 5.

dan AIDA di Jakarta. Peleburan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 11 Tahun 1960. Lembaga baru tersebut diberi nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta atau sekarang kita kenal sebagai UIN Sunan Kalijaga.²

UIN Walisongo, yang dulu bernama IAIN Walisongo, secara historis, resmi berdiri pada tanggal 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI (KH. M. Dachlan) No. 30 dan 31 tahun 1970. Pada awal berdirinya, Perguruan Tinggi Agama Islam ini memiliki 5 fakultas yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah, yakni Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari'ah di Bumiayu, Fakultas Syari'ah di Demak, Fakultas Ushuluddin di Kudus dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Namun, ide dan upaya perintisannya telah dilakukan sejak tahun 1963. Sebelum diresmikan oleh pemerintah, para pendiri merintis pendirian fakultas-fakultas Agama Islam di beberapa daerah yang telah disebutkan di atas.

Keberadaan IAIN Walisongo sendiri tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat santri di Jawa Tengah akan adanya lembaga pendidikan tinggi yang menjadi wadah pendidikan Islam pasca pesantren.³ Pada saat yang sama, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah adalah daerah yang memiliki basis pesantren yang sangat besar. Semangat ini pada gilirannya tercermin dalam penamaan lembaga tersebut. Para pendiri IAIN dulu secara sadar memberi nama Walisongo karena diharapkan menjadi simbol sekaligus spirit bagi dinamika sejarah perguruan tinggi agama Islam terbesar di Jawa Tengah ini.⁴ UIN Walisongo terlibat dalam pergulatan meneruskan tradisi dan cita-cita Islam inklusif ala walisongo, sembari melakukan inovasi agar kehadirannya dapat selalu sesuai dengan kondisi zaman, tanpa menghilangkan tradisi yang telah melekat di kehidupan masyarakat muslim pada umumnya. Selanjutnya lembaga ini diharapkan

² *Ibid.*, hlm. 6-7. (UIN Walisongo, 2015)

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

akan secara signifikan berdaya guna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan secara nyata berkhidmah untuk membangun peradaban umat manusia.

Tahun 2014 merupakan momen yang bersejarah bagi UIN Walisongo. IAIN Walisongo secara resmi beralih status menjadi UIN Walisongo dengan harapan status Universitas dapat memberikan kontribusi lebih bagi perkembangan ilmu agama dan ilmu umum. Perjalanan panjang transformasi IAIN ke UIN Walisongo berujung ketika Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 pada 16 Oktober 2014 mengenai alih status IAIN menjadi UIN Walisongo. Pada tanggal 19 Desember 2014 Presiden Joko Widodo kemudian meresmikannya di Istana Negara, Jakarta. Kemudian, Menteri Agama Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin di Aula II Kampus 3 pada tanggal 6 April 2015 bertepatan dengan Dies Natalis UIN Walisongo yang ke-45. Momentum ini sekaligus menegaskan hari lahir UIN Walisongo tetap pada tanggal tersebut.⁵

Perubahan status dari IAIN menjadi UIN juga berdampak pada perkembangan fokus studi di UIN Walisongo. Jika pada masa IAIN hanya fokus pada studi keIslaman, UIN Walisongo hadir dengan fokus studi yang lebih luas dan tidak terbatas pada *Islamic Studies* saja. Saat ini UIN Walisongo memiliki 8 Fakultas dengan 35 program studi tingkat sarjana (S1) dan 1 program studi diploma (D3). 8 fakultas tersebut adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST). UIN Walisongo juga mempunyai Program Pasca Sarjana tingkat Magister (S2) dan Doktor (Ss3). dan dari 8 Fakultas tersebut mempunyai jurusan (program studi) yang jika ditotal

⁵ *Laporan Rektor UIN Walisongo Tahun 2015*, hal. 23.

berjumlah 38. UIN Walisongo juga memiliki program pasca sarjana tingkat magister (S2) dan doktor (S3) dengan 8 program studi.

UIN Walisongo terlibat dalam pergulatan meneruskan tradisi dan cita-cita Islam inklusif ala Wali Songo, sembari melakukan inovasi agar kehadirannya dapat selalu sesuai dengan kondisi zaman, tanpa menghilangkan tradisi yang telah melekat di kehidupan masyarakat muslim pada umumnya. Semangat ini tercermin dalam upaya UIN Walisongo yang tidak ingin mendikotomikan berbagai macam ilmu, tetapi ingin mengkombinasikannya, sehingga tercapai apa yang dimaksud dengan Kesatuan Ilmu Pengetahuan. Semangat ini tercermin dalam visi, misi, dan tujuan UIN Walisongo, yaitu

1. Visi

Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan ber-*akhlak al-karimah*;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
- d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional;
- f. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional.

3. Tujuan

1. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
2. Mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa dan bernegara.

B. Sekilas Tentang NU dan Muhammadiyah

Pada tahun 1926, di Surabaya, para kiai pesantren *Ahlussunah wal Jamaah* (Aswaja) mendirikan *jam'iyah* (organisasi) bernama Nahdlatul Ulama (NU), kebangkitan para ulama. Sebelum organisasi itu berdiri, para tokohnya lebih dahulu mendirikan tiga pilar penyangga utama, yaitu *Nahdlatul Wathan* pada tahun 1914, *Tashwirul Afkar* pada tahun 1918, dan *Nahdlatul Tujjar* tahun 1924. Menurut Choirul Anam dalam buku *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (2010), kebangkitan ulama NU merupakan kelanjutan dari gerakan Wali Songo dan ulama penyebar Islam lainnya di Nusantara. Selama ratusan tahun, perjuangan tersebut turun-temurun, sambung-menyambung, bergerak mempertahankan Islam di Nusantara.⁶ Lanjut Anam, karena keadaan terus berubah, tantangannya pun berbeda, karena itu, cara para kiai Aswaja bergerak dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam pun berubah juga. Jika sebelumnya hanya melalui pesantren dan bergerak sendiri-sendiri, para kiai mencoba dengan mendirikan organisasi.⁷

Tantangan baru tiada lain adalah penjajahan bangsa Eropa mulai Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, serta terakhir bangsa Asia (Jepang). Mereka tidak hanya mengeruk kekayaan alam di Nusantara, tetapi menyebarkan agama dan budaya mereka dengan begitu masif karena terorganisir dengan baik. Dengan demikian, motif para kiai mendirikan organisasi adalah untuk menahan persebaran

⁶ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Aksara Mulia, 2010, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

agama dan budaya yang dibawa penjajah. Pada saat yang sama, berusaha lepas dari belenggu penjajahan (nasionalisme). Motif mempertahankan agama ini tiada lain adalah tetap berlangsung ajaran, pemikiran, praktik Islam *Ahlussunah wal Jamaah* dengan mazhab empat. Hal ini merupakan penegasan dari perkembangan saat itu.

Di Timur Tengah muncul paham baru yang menggagas pembaruan dalam Islam dengan slogan kembali pada Al-Qur'an dan hadits dan anti-taqlid kepada mazhab empat. Di Arab Saudi juga muncul pula paham Wahabi. Paham tersebut semakin kuat dan masif ketika disokong kekuasaan. Sejak Ibnu Saud, Raja Najed menaklukkan Hijaz (Makkah dan Madinah) tahun 1924-1925, aliran Wahabi sangat dominan di tanah Haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan mazhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh. Paham-paham tersebut juga mendapat pengikut kuat di Nusantara yang mengampanyekan anti-bidah di mana-mana.

Para ulama Aswaja di Nusantara, risau dengan kebijakan Arab Saudi tersebut. Mereka kemudian merencanakan untuk mengirimkan utusan ke Tanah Suci Mekkah, menemui penguasa saat itu untuk meminta menghentikan kebijakan itu. Rencana untuk mengirim utusan dilaksanakan di kediaman KH Wahab Chasbullah di Kertopaten, Surabaya pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926, untuk membentuk Komite Hijaz yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama.⁸

Sementara motif kedua berdirinya NU adalah nasionalisme atau membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama, sejalan dengan kondisi perjuangan umat Islam saat itu, yakni sedang dalam perjuangan membangkitkan kesadaran nasional. Salah satu contoh adalah *Resolusi Jihad* pada tanggal 22 Oktober 1945 yang diserukan oleh tokoh besar ulama NU, KH. Hasyim Asyari untuk melawan tentara Belanda di Surabaya.

⁸ *Ibid.*, hlm.7.

Mereka melakukan perjuangan melawan penjajah dengan membentuk *Hizbullah* (tentara Allah) dan kemudian *Sabilillah*, sebuah kelompok militer kemerdekaan.⁹

Selain memiliki peran untuk kemerdekaan Indonesia, dan mempertahankannya, NU juga memiliki andil dalam perdamaian dunia. KH Ahmad Sjaichu, putra tiri KH Abdul Wahab Chasbullah, menggerakkan roda Konferensi Islam Asia Afrika pada Maret 1965, kemudian menjadi Sekjen Organisasi Islam Asia Afrika. Wadah internasional ini mulai mengkerut saat Bung Karno tidak lagi menjadi presiden RI. Berpuluh tahun kemudian, sayap internasional NU lintas batas digerakkan oleh Gus Dur melalui *World Conference on Religion and Peace* (WCRP). Beliau menjadi presidennya. Secara individu, Gus Dur dengan lincah bergerak ke berbagai jaringan di luar negeri. Dia memainkan pengaruhnya dan pemikirannya, serta memperluas jaringannya.¹⁰

Sayap internasional NU mengepak lebih jelas di era KH Hasyim Muzadi dengan dibentuknya Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di berbagai negara. Kiai Hasyim kemudian menginisiasi pelaksanaan *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) beberapa angkatan, yang menghimpun para ulama dari Sunni dan Syiah moderat untuk mewujudkan perdamaian dunia. Pengganti Kiai Hasyim, KH Said Aqil Siroj punya wadah lain. Namanya *International Summit Of Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL). Acara yang mempertemukan ratusan delegasi ulama dari berbagai negara ini juga mencari format terbaik yang pas mewujudkan dunia yang berkeadilan. Di era Kiai Said pula, NU memiliki adik di luar negeri. Di Afganistan, ulama lintas etnis mencari komposisi yang pas untuk mendamaikan konflik negaranya. Kemudian, ulama Afganistan ini mengkloning NU di negaranya, menjadikan NU sebagai prototipe organisasi yang menebarkan kedamaian.

⁹ Miftahuddin, dkk., *Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan menuju Kemerdekaan sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)*”, Laporan Penelitian Payung Fakultas Ilmu Sosial UNY, Yogyakarta: UNY Press, 2012, hlm. 5.

¹⁰ <https://www.nu.or.id/post/read/80026/peran-nu-untuk-perdamaian-dunia> , diakses pada 23 Maret 2020.

NU Afganistan memang tidak punya kaitan struktural dengan PBNU, tapi NU dijadikan parameter organisatoris dan sumber inspirasi. Kini sudah berdiri 40 cabang NU Afganistan di berbagai distrik. Dalam acara ISOMIL tahun 2016, beberapa negara di Eropa juga tertarik mendirikan NU di negaranya masing-masing, sebagaimana yang telah dilakukan para ulama Afganistan.¹¹ Pada Juli 2016, Habib Luthfi bin Yahya menggelar Konferensi Internasional Bela Negara dengan mengundang unsur ulama dari berbagai kawasan. Ini even kedua yang digelar oleh *Jamiyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah* (JATMAN) yang dipimpin Habib Luthfi, setelah beberapa tahun sebelumnya menggelar *Multaqa Shufi Al-'Alami*.¹² Melalui berbagai kegiatan tersebut, ulama NU tidak hanya berusaha menjadikan Islam sebagai ajaran universal, menggerakkan jejaring ulama internasional, serta berusaha mengerem laju radikalisme berbaju agama, melainkan lebih dari itu, para individu NU maupun secara organisatoris bergerak dinamis mewujudkan perdamaian dunia.¹³

Lebih dulu hadir dari pada NU, salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 H. atau 18 November 1912 M di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi Islam Indonesia yang berhaluan modernis, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam. Tetapi organisasi Muhammadiyah diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim *Statuten Muhammadiyah* (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam *Statuten Muhammadiyah* yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal Hijriyah.¹⁴

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Seluruh ulasan ini disadur dan diringkas dari <http://www.muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html> , diakses pada 23 Maret 2020.

Kata ‘Muhammadiyah’ secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata ‘Muhammadiyah’ dimaksudkan untuk menisbatkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbatan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut:

“...tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw,... Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.”

Kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari pemikiran dan perjuangan KH. Ahmad Dahlan. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.¹⁵ Ulama-ulama pembaharu Islam inilah yang membentuk gagasan Kyai Dahlan, yang kemudian membentuk organisasi pembaharu Islam, Muhammadiyah, yang bernuansa modernis.

Kyai Dahlan, sebagai pembaru Islam, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid (‘aqidah), ibadah, mu’amalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Sahih, dengan membuka ijtihad. Mengenai langkah pembaruan Kyai

¹⁵ *Ibid.*,

Dahlan, bisa disimpulkan dalam beberapa hal. Dalam bidang tauhid, KH. A. Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik, dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah, dalam bidang mumalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam ber-ijtihad.

Adapun langkah pembaruan yang bersifat reformatif ialah dalam merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kuntowijoyo, gagasan pendidikan yang dipelopori Kyai Dahlan, merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Lembaga pendidikan Islam modern bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu.¹⁶

Perjalanan sejarah Muhammadiyah dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal melekat dengan nilai dan pandangan Islam yang berkemajuan. Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya senantiasa berorientasi pada sikap dan gagasan yang berkemajuan. Sebab, Muhammadiyah sungguh-sungguh percaya bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, pada tahun 2018 menjelaskan, bahwa selama satu abad terlihat sekali karakter Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang seluruh usahanya ditujukan untuk kemajuan semua umat manusia. Usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah semuanya untuk program perdamaian, kemanusiaan, kemasyarakatan, serta berbuat kebajikan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/18/10/22/ph02vn399-perjuangan-muhammadiyah-untuk-bangsa> , diakses pada 23 Maret 2020.

Hal ini, lanjut dia, merupakan aktualisasi dari spirit menghadirkan ajaran Islam sebagai *Din al- 'Amal wa Tanwir* yakni agama sebagai seperangkat perbuatan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Spirit kemanusiaan tersebut juga dilandasi nilai ajaran Islam sebagai *Din al-Salam* yaitu agama untuk perdamaian dan keselamatan hidup bersama. Lebih jauh, Haedar menjelaskan, Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada berbagai periode pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut.¹⁸

Kehadiran Muhammadiyah juga mendapat sambutan yang positif dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setidaknya sejarah mencatat dukungan Kasultanan dalam berbagai aktivitas Persyarikatan Muhammadiyah seperti memberikan rekomendasi yang diberikan Sri Sultan Hamengku Buwono VII, sehingga Muhammadiyah mendapat *Rechtspersoon* (badan hukum) dari pemerintah Hindia Belanda.¹⁹ Selain itu kehadiran Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada peresmian gedung Madrasah Muallimin dan pemberian bantuan sebidang tanah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk pendirian sekolah dasar menjadi bukti lain kedekatan tersebut. Yang menarik pula dalam beberapa kegiatan muktamar, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan X selalu hadir dan kemudian menerima pengurus yang terpilih. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa tanpa mengurangi kontribusi yang lain, tulang punggung Islam yang menganut modernisasi Islam adalah NU dan Muhammadiyah. Ia melanjutkan, Tanpa mengurangi peran organisasi Islam yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan berdiri hingga saat ini karena dua organisasi besar itu mendukung negara kesatuan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

C. Bentuk Aktivitas Keagamaan UIN Walisongo

Sebagai salah satu kampus Islam negeri terbesar, UIN Walisongo telah mengkampanyekan diri sebagai rumah Moderasi Islam. UIN Walisongo aktif dalam menyebarkan gagasan Islam *Wasathiyah* atau Islam Moderat dalam beberapa agenda dan kegiatan mereka. Tulisan ini akan merangkum bentuk-bentuk aktivitas keagamaan UIN Walisongo mulai kepemimpinan Rektor Muhibbin periode kedua (2015-2019) sampai kepemimpinan Rektor Imam Taufiq (2019 – sekarang). Informasi yang peneliti cantumkan dalam bagian ini berasal dari berbagai sumber, seperti laporan tahunan rektor, tim humas universitas, sosial media, website resmi UIN Walisongo, dan lainnya. Pembatasan waktu objek penelitian (2016-sekarang) disebabkan dua pertimbangan, yaitu aktualitas informasi dan kemudahan dalam memperoleh data.

Tabel 1. Data Kegiatan dan Aktivitas Keagamaan UIN Walisongo tahun 2016-2019

| No. | Kegiatan | Uraian Kegiatan | Waktu |
|-----|--|--|--------------------|
| 1. | Dies Natalis ke-46 | a. Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) atau nota sepemahaman dengan Jamaah Al-Khidmah Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Dzikir Akbar pada setiap Dies Natalis UIN Walisongo; b. Majelis Dzikir, Istighosah dan <i>Maulidurrasul</i> . | 6 April 2016 |
| 2. | Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) | a. Materi Islam Nusantara; b. Membumikan nilai-nilai KeIslaman dan Indonesiaan; c. Pendidikan Anti Radikalisme; | 22-26 Agustus 2016 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|---------------------|
| 3. | Temu Alumni FUHUM UIN Walisongo | a. Tema acara “ <i>Satu Jiwa, Satu Keluarga</i> ”; b. Khataman al-Qur’an dan tahlil; | 26 Desember 2016 |
| 4. | Dies Natalis ke- 47 | a. Tema Acara “ <i>Agama sebagai Sumber Keharmonisan Hidup</i> ”; b. Rahim Bangsa: <i>Meski Berbeda, Kita Saudara</i> ; c. Seminar Nasional dengan tema “ <i>Mengoptimalkan Peran Pemuda dalam Merealisasikan Nilai-Nilai Nasionalis yang Berdasarkan Aswaja</i> ” d. Majelis Dzikir, Istighosah dan <i>Maulidurrasul Al-Khidmah</i> ; e. Orasi Ilmiah “ <i>Membangun Pendidikan Islam Harmonis</i> ”; ²¹ | 6 April 2017 |
| 5. | Halaqoh Kebangsaan | a. diselenggarakan oleh UIN Walisongo dan KALAM Walisongo b. Tema “ <i>Meneguhkan Semangat dan Komitmen Berbangsa dan Bernegara Kaum Santri</i> ” | 12 Mei 2017 |
| 6. | Dialog Publik | a. Dialog Publik “ <i>Spirit Harkitnas dalam Penguapan Nasionalisme</i> ”; b. diselenggarakan oleh KALAM Walisongo. | 20 Mei 2017 |

²¹ <http://erfansoebahar.web.id/selamat-hari-kamis-ini-uin-walisongo-memperingati-dies-ke-47>
diakses pada 25 Maret 2020.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------|
| 7. | Halal Bihalal UIN Walisongo | a. Pembicara: Ulama Muda NU KH. Ahmad Muwaffiq; b. Ia menyampaikan tausiyah islam nusantara dan sejarah walisongo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara | 11 Juni 2017 |
| 8. | Bedah Buku | a. diselenggarakan oleh DEMA UIN Walisongo b. Bedah Buku " <i>Jihad NU Melawan Korupsi</i> " c. Narasumber: Ketua PW NU Jawa Tengah dan KPK RI | 22 Mei 2017 |
| 9. | Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) | a. Tema <i>Meneguhkan Integritas Mahasiswa dalam Upaya Memperkokoh NKRI</i> ; b. Formasi <i>Paper Mob: Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, NKRI Harga Mati, terrorism has no religion</i> ; | |
| 10. | Reuni Akbar UIN Walisongo | a. tema acara <i>"Menumbuhkembangkan Berbangsa Dan Bernegara Kalam Santri"</i> . | 12 Mei 2017 |
| 11. | Memperingati Hari Santri yang ke-3 | a. UIN Walisongo menggelar upacara peringatan Hari Santri tahun 2017 di lapangan kampus 1 pada Senin, 23 Oktober 2017; | 22 Oktober 2017 |

| | | | |
|-----|-------------------------|--|------------------|
| | | b. Pembacaan Ikrar Santri, resolusi Jihad, serta menyanyikan lagu Ya Lal Waton; | |
| 12. | Dies Natalis ke-48 | a. Tema Acara “ <i>Khidmat kemanusiaan dan peradaban</i> ”; b. Orasi Ilmiah Hanif Dhakiri (Menaker RI) c. Majelis Dzikir, Istighosah dan <i>Maulidurrasul</i> Al-Khidmah; | 6 April 20178 |
| 13. | Halaqoh Ulama Perempuan | Diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LP2M dan Kementerian Agama RI. Acara tersebut bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi para Ibu Nyai Muda dan para Kyai yang peduli terhadap gerakan gender. ²² Acara tersebut diselenggarakan untuk menguatkan jaringan untuk memperkuat NKRI sekaligus berpartisipasi menyegarkan moderasi Islam. ²³ | 27-29 Maret 2018 |
| 14. | Bedah Kitab Pegon Jawa | Bedah tiga kitab pegon Jawa Karya Mbah Bisri, Tafsir Al Ibriz, Tarikhul Auliya’ dan Ngudi Susilo | |

²² <https://metrosemarang.com/ulama-perempuan-diminta-peka-persoalan-kebangsaan-65854> , diakses pada 26 Maret 2020.

²³ <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/reuni-akbar-alumni-uin-walisongo-semarang> , diakses pada 26 Maret 2020.

| | | | |
|-----|--------------------------|--|-----------------|
| | | oleh Pusat Kajian Islam dan Budaya Jawa. Acara ini bertujuan untuk menjelaskan nilai sejarah Walisongo hingga kemerdekaan Indonesia | |
| 15. | Upacara Hari Santri ke-4 | <p>a. Ratusan santri Ma'had Walisongo menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional;</p> <p>b. Upacara yang dimulai pukul 06.45 WIB ini mengusung tema kreatifitas santri dalam membangun negeri berakhlak karimah.;</p> <p>c. Upacara dipimpin oleh Wakil Rektor III.</p> | 22 Oktober 2018 |
| 16. | Dies Natalis ke-49 | <p>a. Tema Acara "<i>Kampus Kemanusiaan dan Peradaban di Era Industri 4.0</i>";</p> <p>b. Bedah Buku <i>Saring sebelum Sharing</i>, karya Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, Ph. D (Ketua PCI NU Australia dan New Zealand) oleh LP2M UIN Walisongo;</p> <p>c. Pemeran Himpunan Pengusaha Santri Indoneisa (HIPSI);</p> <p>d. Ziarah Walisongo untuk Dosen, Karyawan dan Pimpinan UIN Walisongo;</p> | |

| | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|
| | | <p>e. Seminar dan Dialog Publik Islam “<i>Kewarganegaraan dan Negara Bangsa</i>” oleh FUHUM;</p> <p>f. Majelis Dzikir, Istighosah dan <i>Maulidurrasul</i> Al-Khidmah;</p> <p>g. Malam Budaya dan <i>launching</i> buku “<i>Kiai Saridin dan Puisi Kehidupan</i>”, karya Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag;</p> | |
| 17. | PBAK 2019 | <p>a. tema “<i>Eksplorasi Spirit Kemanusiaan Menuju Indonesia Berkeadaban</i>”;</p> <p>b. <i>Paper Mob</i>; Tuntaskan Kasus Munir;</p> <p>c. Kewajiban Mahasiswa Baru tahun 2019 untuk hafal lagu <i>Ya Ahlal Wathon</i></p> | |
| 18. | HUT FST ke-4 | <p>a. diselenggarakan oleh FSTFakultas Sains dan Teknologi ;</p> <p>b. Saintek Bersholawat pada tanggal silam;</p> <p>c. memperingati haul Gus Dur;</p> <p>d. khataman Al-Qur’an;</p> <p>e. Festifal rebana se-Jawa Tengah;</p> <p>f. Istigosah, Tahlil dan doa bersama, dan pembacaan Maulid Simtudduror yang dipimpin oleh</p> | 28 November 2019 |

| | | | |
|-----|---------------------|---|-----------------|
| | | K.H. Anashom, Ketua Tanfidziyah NU Kota Semarang. ²⁴ | |
| 19. | Upacara Hari Santri | a. Rektor UIN Walisongo memimpin langsung upacara hari santri tahun 2019; b. diwajibkannya seluruh keluarga besar UIN Walisongo untuk mengenakan pakaian ala santri, bagi laki-laki diwajibkan mengenakan baju putih bersarung dan berpeci sedangkan perempuan diwajibkan mengenakan baju putih bersarung/rok dan berkerudung putih. ²⁵ | 22 Oktober 2019 |

D. Peta Struktur Organisasi UIN Walisongo, NU Jawa Tengah dan Muhammadiyah tahun 2015 hingga Sekarang

Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan peta struktur organisasi UIN Walisongo, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 2015 hingga sekarang. Pembatasan periode kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada tahun di mana UIN Walisongo diresmikan, yaitu tahun 2015. Berikut peneliti sampaikan struktur organisasi 3 institusi tersebut.

²⁴ <https://walisongo.ac.id/?p=10000000004822&lang=id> diakses pada 3 April 2020.

²⁵ Ibid.,

1. Struktur Organisasi UIN Walisongo

Periode 2015-2019

PIMPINAN REKTORAT

| | |
|---|----------------------------------|
| Rektor | Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. |
| Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan | Dr. Musahadi, M.Ag. |
| Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. |
| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama | Prof. Dr. Suparman Syukur, M.Ag. |
| Kepala Biro Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan | Priyono, M.Pd. |
| Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama | Drs. Adnan, M.Ag. |
| Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Dr. Abdul Muhaya, M.A. |
| Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Dr. Sholikhan, M.Ag. |
| PIMPINAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA | |
| Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Dr. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag. |
| Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum | Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. |
| Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Dr. Rahardjo, M.Ed.St. |
| Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Dr. Imam Yahya, M.Ag. |
| Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosiologi | Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. |
| Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan | Dr. Darmu'in, M.Ag. |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Dekan Fakultas Sains dan Teknologi | Dr. Ruswan, M.A. |
| Direktur Pascasarjana | Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.Ag |

Tabel 1. Struktur Organisasi UIN Walisongo 2015-2019

Periode 2019-2023²⁶

PIMPINAN REKTORAT

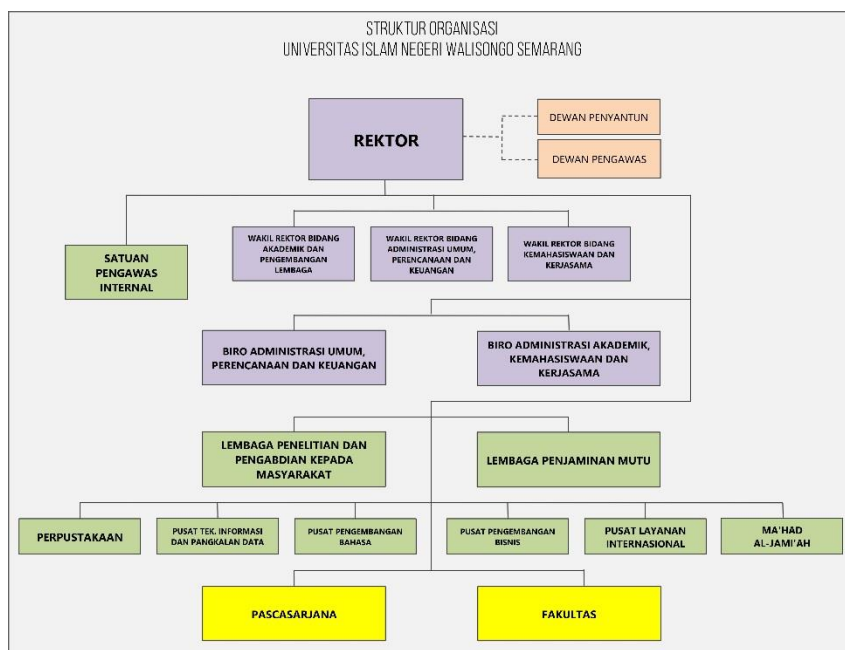
| | |
|---|---|
| Rektor | Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. |
| Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan | Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag |
| Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag |
| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama | Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag |
| Kepala Biro Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan | Priyono, M.Pd. |
| Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama | Drs. Adnan, M.Ag. |
| Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Dr. H. A Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag |
| Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag |
| PIMPINAN FAKULTAS DAN PASCASARJANA | |
| Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi | Dr. Ilyas Supena, M.Ag |
| Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum | Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag |

²⁶ Struktur Organisasi UIN Walisongo periode 2019-2023, diakses dari https://walisongo.ac.id/?page_id=4381&lang=id, pada 18 April 2020.

| | |
|---|--|
| Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Dr.Hj. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag |
| Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora | Dr.H. Hasyim Muhammad, M.Ag. |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag. |
| Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosiologi | Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. |
| Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan | Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag |
| Dekan Fakultas Sains dan Teknologi | Dr. H. Ismail, M.Ag |
| Direktur Pascasarjana | Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag |

Tabel 2. Struktur Organisasi UIN Walisongo 2019-2023

Berikut adalah struktur organisasi UIN Walisongo



Gambar 2. Struktur Organisasi UIN Walisongo

2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah

Dalam struktur lembaga kepengurusan NU terdapat 3 klasifikasi, yaitu : Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziyah. Mustasyar adalah penasihat, yaitu bertugas memberikan nasehat kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya (pengurus besar, wilayah, dan cabang). Syuriah adalah pimpinan tertinggi, tugasnya yaitu membina, mengendalikan, mengawasi serta penentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Tanfidziyah adalah pelaksana, tugasnya adalah melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus Syuriah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data kepengurusan PW NU Jawa Tengah tahun 2013-2018 di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH. Ubaidillah Shodaqoh dan Ketua Tanfidziyah Drs. H. Abu Hapsin Umar, MA, Ph.D, dan kepengurusan tahun 2018-2023 dibawah kepemimpinan Rais Syuriah KH. Ubaidillah Shodaqoh dan Ketua Tanfidziyah Drs. H. Mohamad Muzamil. Berikut data tersebut:

Masa Khidmat 2013-2018²⁷

| Mustasyar: | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| KH. Wildan Abdul Hamid | KH. Habib Syech bin Abdul Qodir Al-Segaf | Drs. H. Zamakhsyari Dhofier, Ph. D. |
| KH. Dimiyati Rois | KH. Munib Zuhri | Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si |
| KH. Sya'roni Ahmadi al-Hafidh | KH. Habib Baqir Al-Attas | Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA. |
| KH. Hasbullah Badawi | Drs. KH. Ahmad | KH. Nurcholis Ali, BA |
| KH. Hanif Muslich, Lc. | Drs. H. Ali Mufiz, MPA. | KH. Ahmad Shobri |
| Rais Syuriah: | KH. Ubaidillah Shodaqoh | |
| Wakil Rais: | | |

²⁷ Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Masa Khidmat 2013-2018, diakses dari <https://nujateng.com/pwnu/> pada 18 April 2020.

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| KH. Wahid Abdul Karim | Drs. KH. M. Adnan, MA | KH. Mu'ad Thohir |
| KH. Dr. Abdul Ghofur Maemun, Lc | KH. Ahmad Chlawani Nawawi | KH. Roghib Mabror |
| KH. Muromi | KH. Subhan Ma'mun | Drs. KH. M. Dian Nafi', M.Pd |
| KH. Said Abdurrahim | Drs. KH. Ahmad Ghozali, M.Si | KH. Minanul Aziz, M.Ag |
| KH. A'wani Sya'roni | | |
| Katib: | KH. Dr. Fadlolan Musyafa', Lc, MA | |
| Wakil Katib: | | |
| KH. Ahmad Sya'roni, M.Ag. | KH. Hilmi Wafa' Mahsuni, Lc. | KH. Mahrus Abdullah, Lc, M.Si |
| KH. Ahmad Roziqin, Lc. | KH. Abdur Rosyid | KH. Miftah Ridho |
| A'wan: | | |
| Prof. Dr. H. Fatchurrahan, M.Pd. | KH. Abd. Rozaq Shofawi | Dr. H. Arief Mudatsir, M.Si. |
| Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. | Drs. H. Ahmad Hakim, MA, Ph.D. | KH. Yusuf Chudlori |
| Drs. H. Khoirudin, M.Ag | KH. Habib Umar Muthahar, SH.. | Drs. H. Wahyudi, M.Si. |
| KH. Tadzkir Mansyur | Dr. H. Noor Ahmad, MA. | H. Suwanto, SE, MM. |
| H. Imam Syafi'i, SE, MM | Dr. H. M. Nafis, MA. | KH. Habib Hasan Thoaha, MBA. |
| KH. Ahmad Said Basalamah | KH. Muhamad Roqib, M.Ag. | KH. Muhammad Chamzah Hasan |
| Ketua Tanfidziyah | Drs. H. Abu Hapsin Umar, MA, Ph.D | |
| Wakil Ketua: | | |
| Dr. H. Najahan Musyafa', MA. | Dr. H. Abdul Hakim, SE | Drs. KH. Syamsudin Asyrofi, M.Hum |
| KH. Ahmad Said Asrori | Drs. H. Budi Setyono, Ph.D | Drs. H. Noorbadi, MM |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Drs. H. Aufarul Marom, M.Si | Drs. Muhammad Muzamil | Dr. H. Imam Yahya, M.Ag |
| Drs. H. Mukhlisin, M.Ag | Drs. KH. Thoyfur Arafat, M.Pd | Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag |
| Sekretaris: | Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag | |
| Wakil Sekretaris: | | |
| H. Amiq Muchlisin, SH | H. Agus Riyanto, M.Si | Iman Fadhilah, M.Si |
| Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag | Nur Shoib, M.H | Drs. H. Amin Handoyo, M.Ag |
| Drs. H. Maman Fatkhurrahman | Puji Wibowo, S.Pd.I | |
| Bendahara: | Drs. H. Abdullah Salam | |
| Wakil Bendahara: | | |
| Drs. H. Sholihul Huda, MM | Ahmad Zaenuri, S.Pd | H. Rofiq Mahfudz, M.Si |

Tabel 3. Kepengurusan Wilayah NU Jawa Tengah Masa Khidmat 2013-2018

Masa Khidmat 2018-2023²⁸

Berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

No. 268/A.II.04/09/2018 tertanggal 26 Dzulhijjah 1.439 H/ 7 September 2018

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Mustasyar: | | |
| KH. A. Musthofa Bisri | KH. Habib Syech bin Abdul Qodir Al-Segaf | KH .Habib Umar Muthohar |
| KH. Dimiyati Rois | KH Muhammad Munif Zuhri | Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA |
| KH. Sya'roni Ahmadi al- Hafidh | KH. Habib Baqir Al-Attas | KH. Hanif Muslich, Lc. |

²⁸ Susunan PWNU Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023, diakses dari

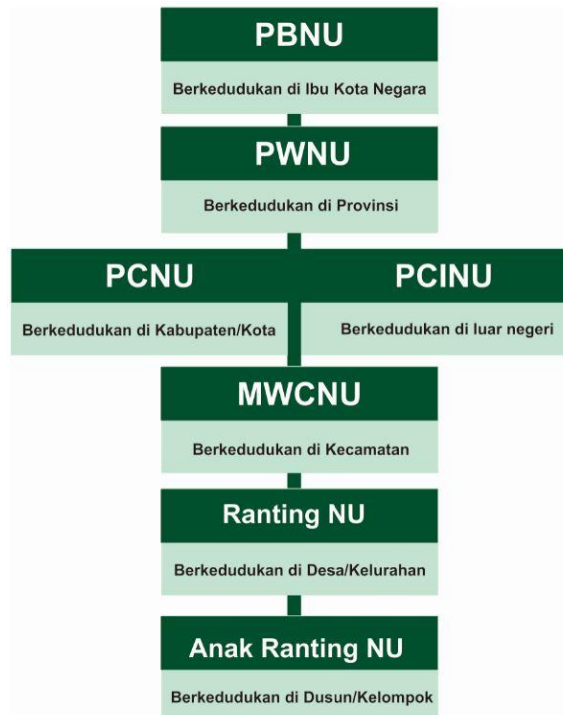
<https://bangkitmedia.com/ini-susunan-pengurus-pwnu-jawa-tengah-masa-khidmat-2018-2023/> pada 18 April 2020.

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| KH. Muromi | KH Baqoh Arifin Abdul Chamid | |
| Rais Syuriah | KH. Ubaidullah Shodaqoh | |
| Wakil Rais: | | |
| KH. A'wani Sya'roni | KH. Roghib Mabror | KH. Hadlor Ihsan |
| KH. Achmad Chalwani Nawawi | KH. Subhan Ma'mun | KH. Sholahudin Masruri |
| KH. Muhlis Hudaf | Drs. KH. Ahmad Ghozali, M.Si | KH. Ma'sum Abi Darda' |
| KH Abu Hafsin Umar, MA, Ph.D | KH. M. Dian Nafi', M.Pd | KH Abi Jamroh |
| Prof.Dr..KH. Imam Taufiq, M.Ag | KH Zaim Ahmad Maksum | KH Ahmad Rozikin, Lc |
| Katib: | KH. Ahmad Sya'roni, M.Ag | |
| Wakil Katib: | | |
| KH. Abdurrosyid | Dr KH. Arja Imroni, M.Ag | KH Muhammad Luthfi |
| KH. Hilmi Wafa Mahsuni, Lc | KH. Nashrul Arif Abdurrahman | Dr KH. Nashrullah Affandi |
| Dr KH. Attabik | Dr Munif Abdul Muhid | |
| A'wan: | | |
| Prof. Dr. H. Fatchurrahan, M.Pd | Prof Dr. Mahmutarom, SH., MH | Drs H. Farhani, SH., MH |
| Prof Dr. Muhibbin, M.Ag | H. Suwanto | KH Habib Hasan Thoaha, MBA |
| KH. Tazdkir Mansyur | KH Muhammad Hamzah Hasan | Dr KH. Noor Achmad |
| KH Busyairi Haris | KH. Yusuf Chudlori | Drs H. Masruchan Syamsuri |
| Dr. KH. Masyudi, M.Ag | KH. Qodirun Nor | Dr KH. Muhammad Rogib, M.Ag |
| Ketua Tanfidziyah: | Drs. H. Mohamad Muzamil | |

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Wakil Ketua: | | |
| Dr. H. Mahsun, M.Ag | Drs. H Aufarul Marom, M.Si | Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. |
| Dr.H.Hasyim Muhammad, M.Ag. | KH. Mandzur Labib | H. Agus Riyanto |
| H Abdul Hakim, SE | Agus Sufyan Hadi | H. Yasir Alimi |
| Sekretaris: | H. Hudaloh Ridwan | |
| Wakil Sekretaris: | | |
| Wakil Sekretaris : H Imam Fadhlilah, M.Si M.Hum. | H Rofiq Mahfudz, M.Si | Dr. Tedi Kholiludin |
| Puji Wibowo, S.Pd.I | Abdul Jalil, S.Kom., M.Si | Nur Shoib, S.HI |
| Khoirul Anwar, S.H.I, M.H.I | Mahbub Zaky | |
| Bendahara: | Kholison Syafi'i, SH | |
| Wakil Bendahara: | | |
| Ahmad Fauzi, SE., MM | H Sholihul Huda, MM | Ahmad Zainuri, S. Pd |

Tabel 4. Kepengurusan Wilayah NU Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023

Berikut peneliti cantumkan struktur kepengurusan di Nahdlatul Ulama



Gambar 3. Struktur Kepengurusan di NU

2. Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015 - 2020²⁹

| | |
|----------------------------------|--|
| Ketua | Drs. H. Tafsir, M.Ag |
| Wakil Ketua | |
| Prof. DR. HM. Dailamy, SP | Pembina LPB dan LPCR |
| Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA | Pembina LBMH dan LPP Pontren |
| Dr. H. Rosihan, SH, M. Ag | Pembina Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta Lembaga Hikmah |
| Dr. H. Ari Anshori, M.Ag | Pembina MPK dan Lembaga Litbang PTM |

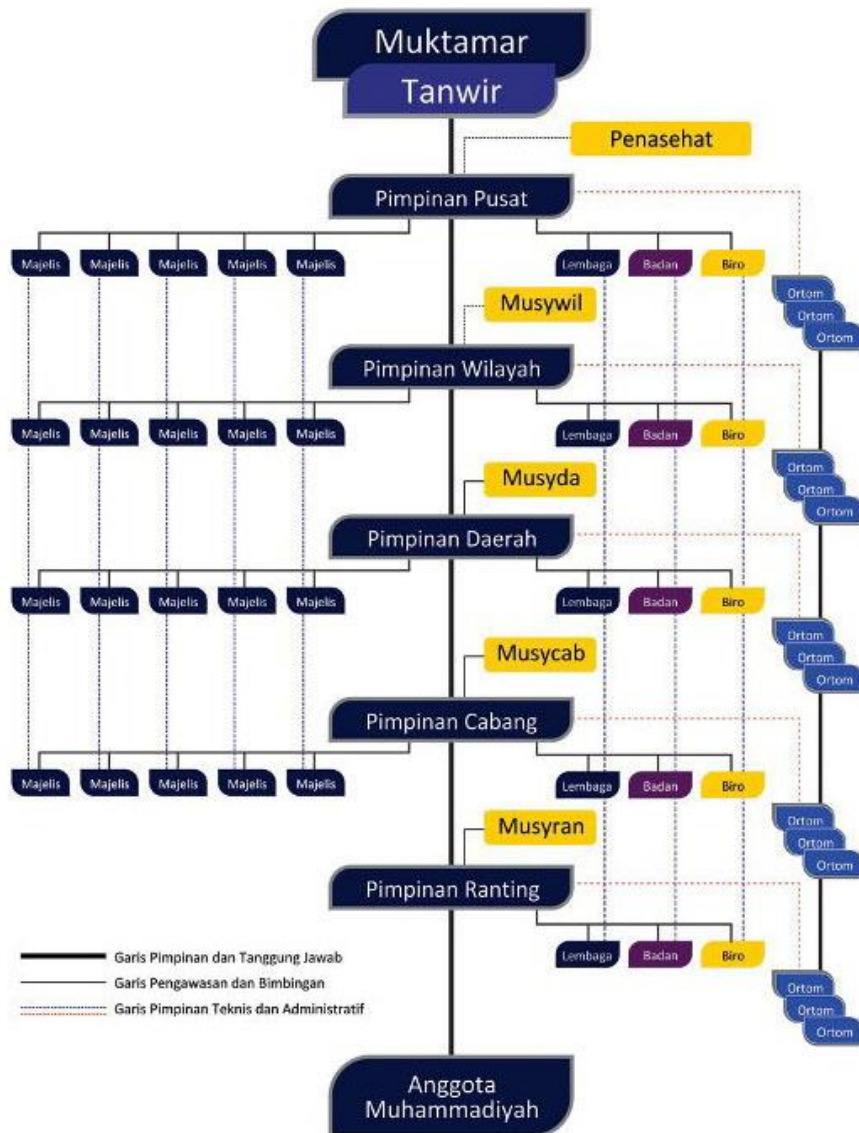
²⁹ Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2015-2020, diakses dari <http://pwmjateng.com/profil-pimpinan/> pada 18 April 2020.

| | |
|---|--|
| Drs. H. M. A. Fattah Santoso, MA. | Majelis Hukum Ham dan Majelis Tarjih |
| Dr. A.Hasan Asy ari Ulama’i, M. Ag | Pembina LAZISMU |
| Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, MA | Pembina MPS dan Majelis Lingkungan Hidup |
| Drs. H. Ali Muhson, M.Ag. M.Pd.I, MH. MM | Pembina Majelis Tabligh dan MPM |
| Drs. H. Musman Tholib, M. Ag | Pembina Majelis Wakaf dan Kehartabendaan |
| Drs. H.M. Yazid Jamil, M.Pd | Pembina Majelis Dikdasmen dan LSBO |
| Sekretaris | |
| Drs. Bisyron Mukhtar, M.Si | |
| Wakil Sekretaris | |
| Drs. Wahyudi, M.Pd | Pembina Majelis Pustaka & Informasi |
| Bendahara | |
| Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd | Pembina LPPK dan MPKU |
| Wakil Bendahara | |
| Dr. H. Darori Amin, M.A | |
| Majelis-Majelis | |
| DR. Imron Rosyadi, M.Ag | Majelis Tarjih dan Tajdid |
| Drs. Danusiri, M.Ag | Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus |
| Dr. Agus Siswanto, MM | Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah |
| dr. Ibnu Nasher Arrohimi, S.Ag, MMR | Majelis Pembina Kesehatan Umum |
| Sugiyono, M.SI | Majelis Pendidikan Kader |
| Drs. Syamsuddin | Majelis Pelayanan Sosial |
| Dr. Haeruddin, SE, MT | Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan |
| Widadi, SH | Majelis Wakaf dan Kehartabendaan |
| Prof. Dr. Absori, SH, M.Hum | Majelis Hukum dan HAM |
| Prof. Dr. Budiyo | Majelis Lingkungan Hidup |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Teguh Hadi Prayitno, MM, M.Hum | Majelis Pustaka dan Informasi |
| AM. Juma i, SE, MM | Majelis Pemberdayaan Masyarakat |

Tabel 5. Struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2015-2020

Berikut ini adalah struktur organisasi Muhammadiyah



Gambar 4. Struktur Organisasi Muhammadiyah³⁰

³⁰ Diakses dari <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html> , pada 18 April 2020.

E. Narasi Sosial Keagamaan yang berkembang di UIN Walisongo

Dalam bagian kali ini, penulis akan mencoba menjelaskan *blue print* yang mencoba dikembangkan oleh UIN Walisongo dengan cara melihat wacana-wacana yang tersebar di berbagai macam agenda UIN Walisongo sendiri. Karena agenda-agenda yang diusung tentu mencerminkan wacana yang ingin dibangun UIN Walisongo untuk membentuk citra UIN Walisongo.

Telah disebutkan di atas, bahwa berdirinya UIN Walisongo Semarang, sesuai dengan namanya, ingin mengikuti jejak Walisongo. Wali Songo memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, utamanya di Jawa. Bagaimana tidak, selama tujuh abad lamanya –sejak abad ke-7 hingga ke-14- Islam ‘tertolak’ di wilayah Jawa. Namun pada saat akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, hampir semua masyarakat di pesisir pantai utara Jawa sudah memeluk Islam. Tidak lain itu diyakini sebagai hasil dakwah dari Wali Songo. Oleh sebab itu, ada penilaian kalau dakwah Wali Songo adalah dakwah yang paling sukses dan berhasil karena mampu mengislamkan masyarakat Jawa. Yang tidak kalah menarik, perubahan masyarakat Jawa, dari agama sebelumnya –Hindu, Budha, Kapitayan, dan lainnya, menjadi Muslim, hanya berlangsung sekitar 50 tahunan.³¹ Itu merupakan waktu yang singkat, dan hasil dari kecanggihan dan kejeniusan dakwah Wali Songo.

Menurut Imdadun Rahmat dalam Bukunya *Islam Indonesia, Islam Paripurna: Pergulatan Islam Pribumi dan Islam Transnasional* (2017), setidaknya ada lima pendekatan dakwah yang digunakan Wali Songo. *Pertama*, pendekatan teologis. Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel adalah yang menggunakan pendekatan ini. Mereka berdakwah bahkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah (waisya dan sudra) saat itu. Masyarakat diajari tentang nilai-nilai

³¹ <https://islam.nu.or.id/post/read/100058/lima-pendekatan-dakwah-wali-songo> diakses pada 25 Maret 2020.

Islam, perbedaan antara pandangan hidup Islam dengan yang lainnya, dan menanamkan dasar-dasar Islam.

Kedua, pendekatan ilmiah. Tidak seperti dua sunan sebelumnya, Sunan Giri berdakwah dengan cara menggunakan pendekatan ilmiah seperti pesantren, membuat pelatihan dan pengkaderan, serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat. Tidak hanya itu, Sunan Giri juga menggunakan permainan sebagai medium untuk berdakwah. *Ketiga*, pendekatan kelembagaan. Sunan Kudus dalam Kesultanan Demak Bintoro dan Sunan Gunung Jati ikut serta mendirikan kesultanan dan aktif di dalamnya. Mereka memiliki pengaruh yang besar di kalangan bangsawan, birokrat, pedagang, dan kalangan elit lainnya.

Keempat, pendekatan sosial. Sunan Muria dan Sunan Drajat lebih senang hidup jauh dari keramaian. Mereka memilih untuk berdakwah pada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung-kampung. Mereka mengajarkan masyarakat kecil untuk meningkatkan pemahaman keagamaannya. Mereka juga membina masyarakat agar kehidupan sosialnya meningkat. *Kelima*, pendekatan kultural. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang lebih menonjol menggunakan pendekatan kultural. Mereka sadar bahwa budaya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Jika langsung ditolak, maka masyarakat akan emoh mengikutinya. Solusinya, keduanya melakukan islamisasi budaya. Budaya-budaya yang sudah ada dan berkembang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Diantara produk budaya yang mereka ciptakan dan masih ada hingga hari ini adalah Gamelan Sekaten (dari kata syahadatain), Gapura Masjid (berasal dari kata *ghofura*), baju takwo (dari kata *taqwa*), dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh UIN Walisongo, yaitu ingin mengikuti jejak dan cara para Walisongo dalam berdakwah. Misi UIN Walisongo, dalam beberapa hal, sangat sesuai dengan cara yang dilakukan oleh pendahulunya itu, para Walisongo. Beberapa misi yang sesuai dengan ajaran Walisongo antara lain: menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan

ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah; meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat; menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat; menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Beberapa pendekatan, seperti pendekatan teologis, pendekatan ilmiah, pendekatan kelembagaan, pendekatan sosial, pendekatan kultural, memang dijadikan acuan bagi UIN Walisongo dalam menentukan identitas ke-Islam-annya.

UIN Walisongo sangat menekankan pada kakarakter Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, terutama budaya Jawa.. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan UIN Walisongo, bahwa calon sarjana UIN Walisongo diwajibkan mengambil mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Sebab. Menurut M Rikza yang pada tahun 2018 menjabat sebagai Peneliti Pengkajian Islam dan Budaya Jawa (PPIBJ), Islam lokal Jawa tidak lepas dari asimilasi budaya Hindhu dan Budha. Jika tidak dikenalkan tentang internalisasi budaya lokal itu, budaya Jawa seringkali dianggap haram dan tidak boleh ditiru. Lembaga di UIN Walisongo yang *concern* dalam masalah budaya ini adalah Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa (PPIBJ) yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). PPIBJ sering mengadakan kajian budaya Jawa-Islam untuk mengingatkan pada kita semua bahwa Islam yang berkembang saat ini tidak bisa dilepaskan dari aspek lokalitas Jawa, yang sebelumnya kental dengan agama Hindu, Buddha, dan agama lokal. Pada tahun 2018 PPIBJ mengadakan diskusi rutin bulanan setiap Selasa Legi yang dibuka untuk umum. Untuk awal pertemuan, diskusi itu dimulai dengan bedah tiga kitab pegon Jawa Karya Mbah Bisri, Tafsir Al Ibriz, Tarikhul Auliya' dan Ngudi Susilo.

UIN Walisongo, yang pada awalnya ditujukan sebagai wadah bagi pendidikan pasca pesantren, juga melakukan amaliyah-amaliyah yang erat dengan dunia kepesantrenan. Salah satu budaya santri adalah tawashul atau ziarah. Pada saat Dies Natalis UIN Walisongo ke-48 (2018) dan ke-49 (2019), UIN Walisongo mengadakan acara ziarah walisongo selama tiga hari untuk pihak panitia

penyelenggara. Dan seringkali, pada saat UIN Walisongo mengelat acara, selalu disisipi dengan kegiatan istighosah, dzikir dan maulidurrasul di kampus. Hal ini pernah disampaikan oleh mantan Rektor UIN Walisongo, Muhibbin, bahwa agar civitas akademika UIN Walisongo memiliki kekuatan fikir dan kekuatan dzikir yang baik.

Hari Santri Nasional yang diperingati UIN Walisongo pada tahun 2019, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengadakan upacara. Pada tahun ini nuansa santri sangat kental di UIN Walisongo, terutama berkaitan dengan tata-cara pakaian. Seluruh keluarga besar UIN Walisongo diwajibkan mengenakan pakaian ala santri, bagi laki-laki diwajibkan mengenakan baju putih bersarung dan berpeci sedangkan perempuan diwajibkan mengenakan baju putih bersarung/rok dan berkerudung putih, kewajiban berpakaian ala santri ini berlaku hanya untuk hari selasa tanggal 22 Oktober 2019. Hal ini menguatkan bahwa simbol-simbol santri di UIN Walisongo sangat kuat.

Tidak hanya itu, Islam yang berkembang di UIN Walisongo juga bisa dikatakan memiliki kontribusi bagi bangsa Indonesia. Islam yang diajarkan oleh Walisongo dikenal dengan sebutan Islam moderat. Walisongo, dalam mendakwahkan Islam, tidak memaksa, dan cenderung kooperatif dengan budaya setempat. Budaya yang telah ada dan berkembang pada waktu itu, tidak serta-merta dihapus atau dilarang oleh mereka. Sebaliknya, mereka mengambil budaya setempat sebagai milik Islam, dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam produk budaya tersebut.

Dengan demikian, masyarakat, yang ingin masuk Islam, tidak kehilangan budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Islam seperti inilah yang telah mewarnai mayoritas agama Islam di Indonesia. NU dan Muhammadiyah dikenal luas sebagai organisasi Islam Indonesia yang moderat dan mengedepankan perdamaian bersama dari pada kebenaran sepihak. UIN Walisongo sendiri telah mendeklarasikan sebagai kampus Islam yang moderat. Kita bisa melihat dari

wacana-wacana ke-Islam-an yang berkembang (dan dikembangkan) di dalamnya. Terlebih lagi, para pimpinan UIN Walisongo sendiri memiliki concern di bidang ini, Islam moderat dan Islam yang damai. Di sini, UIN Walisongo menunjukkan bahwasanya Islam adalah sumber keharmonisan hidup, dan harus menjaga kedamaian hidup bersama, meski berbeda budaya dan agama. UIN Walisongo juga tidak ketinggalan berusaha untuk mendidik *civitas akademika* UIN Walisongo untuk selalu berhati-hati dalam dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi yang ada, sehingga tidak terjebak pada tindakan kebohongan dalam menyebarkan informasi atau *hoax*.

Sebenarnya masih banyak lagi narasi yang dibangun oleh UIN Walisongo terkait hal ini, menyebarkan Islam moderat dan menjaga NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Salah satu yang terbaru, beberapa hari setelah dilantik menjadi Rektor baru menggantikan Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag, Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag dalam sambutannya menyampaikan bahwa UIN Walisongo kedepannya akan menjadikan kampus sebagai konsep moderasi beragama, termasuk moderasi dari aspek pengembangan teknologi dan informasi. Hal ini karena UIN Walisongo merasa tertantang oleh problem-problem radikalisme dan terorisme, di tambah lagi saat ini tengah memasuki Revolusi Industri 4.0, yang mana UIN Walisongo harus melakukan adaptasi, terlebih pada bidang teknologi.³²

Keinginan UIN Walisongo untuk menjadikan kampus sebagai pusat moderasi agama ini terjawab. Tidak lama kemudian, masih di tahun 2019, UIN Walisongo mendirikan *Rumah Moderasi Beragama* yang diresmikan oleh Menteri Agama Fahrur Razi. Pada acara ini Imam Taufiq menyampaikan bahwa toleransi, perdamaian, dan rasa saling menyayangi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan. Hal inilah yang menjadikan UIN Walisongo membangun rumah moderasi beragama. Semangat moderasi ini diwariskan dari nama besar Walisongo. Keberadaan UIN Walisongo diharap dapat melahirkan sosok-sosok yang

³² Diakses dari www.walisongo.ac.id pada tanggal 23 Maret 2020.

berperilaku santun, berdakwah dengan rahmat, dan tidak mengedepankan kekerasan. Dengan cara ini lah para walisongo dapat diterima oleh masyarakat.³³

Sebenarnya, Islam Moderat bukanlah sesuatu yang baru bagi UIN Walisongo. Hal ini dibuktikan dengan acara-acara yang telah dihelatnya, yang beberapa sudah disebutkan di atas. Penelitian ini dilakukan dengan membatasi data pada tahun 2015 sampai sekarang, tetapi semangat perdamaian yang dimiliki UIN Walisongo telah digelorakan pada saat UIN Walisongo berdiri, sebagaimana yang disebutkan di atas, mewarisi semangat para penyebar Islam, walisongo. Bahkan, pada tahun 2005, UIN Walisongo – yang dulu masih bernama IAIN Walisongo – mengedarkan layangan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor 19 tahun 2005 pasal 9, tentang larangan bercadar.³⁴

Apa yang diwacanakan oleh UIN Walisongo ini sejalan dengan arus utama wacana ke-Islam-an yang berkembang di Indonesia. Islam di Indonesia dikenal sebagai negara muslim yang berkarakter demokratis, damai, dan berkeadaban. Hal tersebut tidak lepas dari peranan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Wakil Menteri Luar Negeri RI, A. M. Fachir, menyebutkan NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Tak hanya itu, keduanya juga terlibat aktif dalam membangun perdamaian di dunia. Apresiasi ini hadir tidak hanya dari dalam negeri. Penerima Nobel Perdamaian 1998, Ramos Horta juga mengapresiasi peranan dan kontribusi NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam yang mampu menjaga dan merawat perdamaian di Indonesia. Tak hanya itu, Dia juga menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah dinilai mampu membangun perdamaian dan demokrasi di tingkat dunia (Ika, 2019).

Sebagai dua organisasi massa Islam yang kompak mengkampanyekan Islam Moderat, NU dan Muhammadiyah memiliki semangat yang sama dan mampu

³³ <https://siedoo.com/berita-27449-uin-walisongo-miliki-rumah-moderasi-beragama-perkuat-toleransi-di-jateng/> diakses pada 25 Maret 2020.

³⁴ Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo No. 19 tahun 2005 pasal 9, tentang Larangan Bercadar

bersinergi satu sama lain. Mustasyar PBNU KH. A Mustofa Bisri atau Gus Mus menilai, ada sejumlah persamaan di antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya mampu berhubungan secara sinergis. Menurutnya, sinergi NU dan Muhammadiyah terlihat setidaknya dalam beberapa hal, di antaranya tradisi pendalaman ilmu Islam, kecintaan terhadap ibu pertiwi (hubbul wathan), dan kuatnya ruhud da'wah (semangat berdakwah). Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional Sinergi NU dan Muhammadiyah yang digelar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) di Auditorium Kahar Muzakkir, kampus setempat, Yogyakarta, Sabtu (6/2/2016).³⁵ Tak heran jika UGM pernah mengusulkan NU dan Muhammadiyah sebagai kandidat penerima nobel perdamaian.

Kesesuaian antara UIN Walisongo dan kedua organisasi islam ini, NU dan Muhammadiyah, tidak bisa dilepaskan dari orang-orang yang mengelola dan menjalankan UIN Walisongo. Para pegawai dan dosen di UIN Walisongo kebanyakan berasal dari kedua organisasi ini, yang mana mereka menduduki posisi strategis di UIN Walisongo. Rektor UIN Walisongo sendiri, Imam Taufiq, sebelum menjadi Rektor, pernah menjabat sebagai Wakil Katib Syuriah PWNU Jateng 2014-2018.³⁶ Begitu juga Rektor Sebelumnya, Muhibbin Noor, yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, yaitu sebagai lulusan Pesantren Futuhiyyah, Mranggen-Demak, Jawa Tengah.

Sebagaimana yang penulis tulisa dalam BAB II, kekuasaan ini akan melahirkan pengetahuan, dan begitu pula sebaliknya, pengetahuan akan melahirkan kekuasaan. Tokoh-tokoh UIN Walisongo yang mempunyai latar belakang organisasi keagamaan ini telah menentukan wacana yang berkembang. Wacana ini kemudian menentukan pengetahuan apa saja yang boleh berkembang di UIN Walisongo, dan pada akhirnya melanggengkan kekuasaan yang sedang

³⁵ <https://www.nu.or.id/post/read/65574/gus-mus-beberapa-persamaan-nu-dan-muhammadiyah> diakses pada 25 Maret 2020.

³⁶ <https://www.nu.or.id/post/read/108957/gantikan-prof-muhibbin--imam-taufiq-pimpin-uin-walisongo-semarang> diakses pada 25 Maret 2020.

berlangsung. Maka, tak heran, jika dari dulu sampai saat ini, wacana dan pengetahuan islam moderasi di UIN Walisongo mampu bertahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Simbiosis Mutualisme NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah di UIN Walisongo dalam Membentuk Hegemoni Wacana di UIN Walisongo

Sejak berdiri 50 tahun yang lalu, UIN Walisongo sebagai salah satu perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan Islam baik di tingkat regional maupun nasional. Kehadiran UIN Walisongo adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi Islam pasca pesantren. Sebagaimana kita ketahui, Jawa Tengah merupakan daerah dengan basis pesantren dan kelompok Islam tradisional yang cukup banyak. Sesuai dengan namanya, UIN Walisongo diharapkan mampu untuk meneruskan perjuangan Para Wali Sembilan (Songo) sebagai penyebar agama Islam yang inklusif, moderat dan menghargai budaya lokal.

Setelah diresmikan untuk beralih menjadi Universitas (dulunya Institut), UIN Walisongo mengalami banyak perkembangan baik secara lingkup ilmu pengetahuan (agama Islam dan umum) maupun secara pengembangan institusi. Meskipun mengalami banyak perubahan dalam banyak hal, UIN Walisongo hingga hari ini masih konsisten sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang mengembangkan Islam yang moderat, inklusif, dan Islam yang menghargai budaya dan kearifan lokal. KH. Ahmad Daroji salah satu tokoh pendiri IAIN Walisongo dalam sebuah acara menjelaskan bahwa penggunaan nama Walisongo dipilih karena melihat perjalanan panjang Walisongo dalam berdakwah di tanah Jawa.¹

Lanjut KH. Ahmad Daroji, para Walisongo dulu menyebarkan agama Islam dengan jalan damai, bukan paksaan, dan menghormati budaya lokal. Konsistensi ini berlanjut hingga hari ini. Pasca dilantik pada Juli 2019 lalu, Imam

¹ Diakses dari <https://jatengdaily.com/2019/berharap-jiwa-walisongo-melekat-dalam-diri-rektor-baru-uin-walisongo/>, pada 18 April 2020.

Taufiq rektor UIN Walisongo sekarang menyampaikan bahwa UIN Walisongo ke depan akan tetap menjadi *center of moderation*, kampus yang menyebarkan nilai-nilai dan ajaran moderasi Islam, Islam yang cinta perdamaian. UIN Walisongo juga sudah menyiapkan program *moderasipedia*, sebuah *blueprint* tentang bersikap *tawasuth* dalam kehidupan berbangsa dan beragama.²

UIN Walisongo mempunyai pandangan ke depan untuk menjadi universitas Islam riset yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan peradaban. Dalam hal ini, UIN Walisongo menjadikan prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai bagian dalam misi dan tujuannya, yaitu menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal; mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri dharma perguruan tinggi.³ Kemanusiaan mengandung arti bahwa UIN Walisongo melibatkan diri sebagai bagian dalam upaya memanusiaakan manusia, menjunjung tinggi kemanusiaan dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Secara khusus, *civitas academica* UIN Walisongo didorong untuk menjalin hubungan harmonis kepada semua pihak tanpa membedakan suku, budaya, ras, agama dan lainnya. Sementara peradaban mengandung arti bahwa peradaban adalah jalan hidup atau *way of life* setelah manusia hidup dan bernegara.

Melalui prinsip kemanusiaan ini, UIN Walisongo menggunakan pendekatan keilmuan yang berpusat pada unsur ketuhanan dan kemanusiaan (theo-antroposentris).⁴ Sementara melalui peradaban, UIN Walisongo bertekad memberikan kontribusi bagi kualitas hidup manusia di Indonesia dan dunia. Peradaban di sini adalah peradaban yang luhur. Peradaban yang berakar kuat dalam

² Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/05/prof-dr-imam-taufiq-mag-santri-jombang-jadi-rektor-uin-walisongo-semarang> pada 18 April 2020.

³ Visi, Misi, dan Tujuan UIN Walisongo, diakses dari www.walisongo.ac.id pada 19 April 2020

⁴ Rencana Strategis (Renstra) UIN Walisongo tahun 2019-2023, diakses dari <https://walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Renstra-UIN-Walisongo-2019-2023.pdf> pada 18 April 2020.

kearifan lokal Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghargai.

Konsep kemanusiaan, peradaban, dan kearifan lokal yang terdapat dalam visi, misi dan tujuan UIN Walisongo merupakan instrumen untuk mewujudkan Islam moderat ala Walisongo. Islam moderat atau *Wasathiyah* diambil dari istilah *wasatha*, *wustha* yang berarti tengah (Niam, 2019). Dalam Tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. Quraish Shibah (2000), umat Islam telah dijadikan sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang moderat dan teladan. Posisi di tengah adalah posisi yang tidak memihak kanan maupun kiri, sehingga berpotensi untuk berlaku adil. Yusuf al-Qardhawi dalam Niam (2019) menjelaskan bahwa moderat atau pertengahan adalah *al-tawazun* (keseimbangan), yaitu keseimbangan antara dua jalan yang bertentangan. Mereka adalah *ruhiyah* (spiritualisme) dengan *maddiyah* (materialisme); *fardiyah* (individu) dengan (*jama'iyah* kolektif); *waqi'iyah* (kontekstual) dengan *mitsaliyah* (idealisme); *tsabat* (konsisten) dengan *taghayyur* (perubahan). Oleh karena itu keseimbangan lanjut Al-Qardhawi sesungguhnya merupakan watak alam raya (universum) sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi.

Dengan visi, misi, dan tujuan yang mengarah pada moderatisme Islam, UIN Walisongo dalam perjalanannya mempunyai konsistensi dalam menyebarkan nilai-nilai dan ajaran Islam moderat dalam setiap produk keilmuan, kebijakan, serta kegiatan yang diselenggarakan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam BAB sebelumnya tentang bentuk kegiatan dan aktivitas keagamaan di UIN Walisongo kurun waktu 2016 hingga sekarang, dalam tabel berikut peneliti mengklasifikasi kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam lima hal, yaitu⁵

⁵ Informasi lebih detail dapat ditemukan pada BAB III tentang Kegiatan dan Aktivitas Keagamaan UIN Walisongo tahun 2016-2019.

| No. | Kegiatan | Rincian |
|-----|---|---|
| 1. | Forum Ilmiah (<i>scientific forums</i>) | Forum Rahim Bangsa, Seminar Kebangsaan, Halaqoh Kebangsaan, Dialog Publik, Bedah Buku, Halaqoh Ulama Perempuan, Bedah Kitab Pegon Jawa, |
| 2. | Acara-acara seremonial (<i>ceremonial events</i>) | Dies Natalies, OPAK (PBAK), Halal bi Halal, Peringatan Hari Santri. |
| 3. | Kebijakan (<i>legal policies</i>) | SK Rektor IAIN Walisongo No. 19 Tahun 2005 pasal 9 tentang Larangan Bercadar, Rencana Strategis UIN Walisongo tahun 2019-2023. |
| 4. | Jaringan Alumni (<i>alumni network</i>) | Reuni Akbar, Temu Alumni FUHUM 2016. |
| 5. | Kegiatan Keagamaan (<i>religious activities</i>) | Festival Rebana, Majelis Dzikir, Istighosah dan <i>Maulidurrasul</i> . |

Gagasan moderatisme Islam yang diperjuangkan oleh UIN Walisongo nampaknya senafas dengan Islam *Wasathiyah* yang digagas oleh NU dan Muhammadiyah. Mengutip artikel Prof. Dr. Masdar Hilmy (2012) *Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*, konsep moderatisme Islam dalam konteks pemikiran keIslaman di Indonesia setidaknya mempunyai lima karakteristik. Lima karakteristik tersebut adalah ideologi non-kekerasan dalam berdakwah, mengadopsi pola kehidupan modern dan segala derivasinya (IPTEK, HAM, demokrasi, dan sebagainya), rasionalisasi ajaran agama, kontekstualisasi ajaran agama, dan penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam.

Moderatisme Islam yang digagas oleh UIN Walisongo (dari dulu hingga sekarang) dalam hal ini tidak terlepas dari pengaruh dua organisasi keagamaan

terbesar di Indonesia tersebut. Meskipun model Islam moderat di Indonesia sangat beragam, setidaknya NU dan Muhammadiyah sangat representatif untuk mewakili moderatisme Islam di Indonesia. Menurut Masdar Hilmy (2012), pengelompokan kedua organisasi ini ke dalam moderatisme Islam dikarenakan ketidaksetujuannya terhadap sikap dan pandangan keagamaan kelompok garis keras yang menggunakan cara-cara kekerasan, atau mengubah tatanan publik secara revolusioner radikal. NU dan Muhammadiyah juga tidak setuju dengan konsep negara Islam. Bagi keduanya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai asas ideologisnya, UUD 1945 sebagai basis konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sembojannya, dianggap sudah cukup mengakomodasi elemen-elemen substantif ajaran Islam moderat yang bervisi *rahmat lil 'alamîn*.

Dalam konteks modernitas, NU dan Muhammadiyah tidak menunjukkan sikap perlawanan terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Demokrasi dan HAM merupakan nilai-nilai universal dan tidak identik dengan ajaran-ajaran Barat. Islam pun pada prinsipnya sejalan dengan demokrasi karena Islam juga memerintahkan untuk bermusyawarah. Demikian pula dengan HAM. NU dan Muhammadiyah menegaskan bahwa Islam sangat mengapresiasi HAM sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia, termasuk keberhasilan Islam untuk meninggalkan tradisi perbudakan di masa lalu.

Dalam konteks hegemoni wacana di UIN Walisongo, dominannya wacana moderatisme Islam ala NU-Muhammadiyah dari pada wacana yang lainnya setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adanya faktor cara pandang yang sama terhadap Islam, dan faktor kekuasaan di UIN Walisongo. Baik UIN Walisongo maupun NU-Muhammadiyah dalam segala aktivitasnya pun selalu berprinsip pada nilai-nilai moderatisme Islam. Dominasi wacana moderatisme ala NU dan Muhammadiyah di UIN Walisongo juga tidak dilepaskan dari dominannya beberapa pengurus struktural maupun kultural NU ataupun Muhammadiyah Jawa Tengah yang memimpin UIN Walisongo dalam beberapa tahun terakhir. Berikut

peneliti sampaikan daftar tersebut yang kami kombinasikan dari data kepengurusan NU atau Muhammadiyah dan UIN Walisongo yang meliputi pimpinan (sekarang atau sebelumnya) dan dosen.

1. UIN Walisongo dan NU Jawa Tengah (Struktural)

| No. | Nama | Jabatan di UIN Walisongo | Jabatan di NU | |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 2013-2018 | 2018-2023 |
| 1. | Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. | Rektor (2019- 2023) | - | Wakil Rais Syuriah |
| 2. | Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. | Rektor (2015- 2019) | Wakil Katib | A'wan |
| 3. | Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. | Wakil Rektor I (2015-2019) | - | Wakil Ketua |
| 4. | Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag | Dekan FSH | Sekretaris | Wakil Katib |
| 5. | Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. | Dekan FUHUM | Wakil Sekretaris | Wakil Ketua |
| 6. | Drs. H. Abu Hapsin Umar, MA,Ph.D | Dosen FSH | Ketua Tanfidziyah | Wakil Rais Syuriah |
| 7. | Dr. H. Najahan Musyafa', MA. | Wakil Dekan I FDK (2015-2019) | Wakil Ketua | - |
| 8. | Dr. H. Imam Yahya, M.Ag | Dekan FEBI (2015-2019) | Wakil Ketua | - |
| 9. | H. Rofiq Mahfudz, M.Si | Dosen FISIP | Wakil Bendahara | Wakil Sekretaris |
| 10. | Dr. H. Abdul Wahib, M. Ag | Wakil Dekan III FPK (2015-2019) | Wakil Ketua | - |

Selain nama-nama di atas, beberapa pimpinan UIN Walisongo periode 2019-2023 juga tercatat sebagai pengurus NU di level cabang (kota), kecamatan, atau mempunyai ikatan kultural dengan NU

| No. | Nama | Jabatan di UIN Walisongo |
|-----|---|---|
| 1. | Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan |
| 2. | Dr. H. Abdul Kholiq, M.Ag | Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan |
| 3. | Drs. Adnan, M.Ag. | Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama |
| 4. | Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 5. | Dr.Hj. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag | Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
| 6. | Dr.H. Hasyim Muhammad, M.Ag. | Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora |
| 7. | Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag. | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
| 8. | Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum. | Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosiologi |
| 9. | Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag | Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan |
| 10. | Dr. H. Ismail, M.Ag | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi |
| 11. | Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag | Direktur Pascasarjana |
| 12. | Dr. Saminanto, M.Sc | Wakil Dekan I FST |
| 13. | Dr. Nur Khoiri, M.Ag | Wakil Dekan II FST |
| 14. | Dr. Hj. Nur Khasanah, M.Kes | Wakil Dekan III FST |
| 15. | Drs. M. Mudhofi, M.Ag | Wakil Dekan I FDK |
| 16. | Dr. Safrodin, M.Ag. | Wakil Dekan II FDK |
| 17. | Dr. Ali Murtadho M.Pd | Wakil Dekan III FDK |
| 18. | Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag | Wakil Dekan I FSH |
| 19. | H. Tolkah, M.A | Wakil Dekan II FSH |
| 20. | Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag | Wakil Dekan III FSH |
| 21. | Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag | Wakil Dekan I FEBI |
| 22. | H. Khoirul Anwar, M.Ag | Wakil Dekan II FEBI |
| 23. | Drs. H. Saekhu, M.H | Wakil Dekan III FEBI |
| 24. | Dr. Baidi Bukhori, S.Ag, M.SI | Wakil Dekan I FPK |
| 25. | Moh. Arifin SAg M.Hum | Wakil Dekan III FPK |

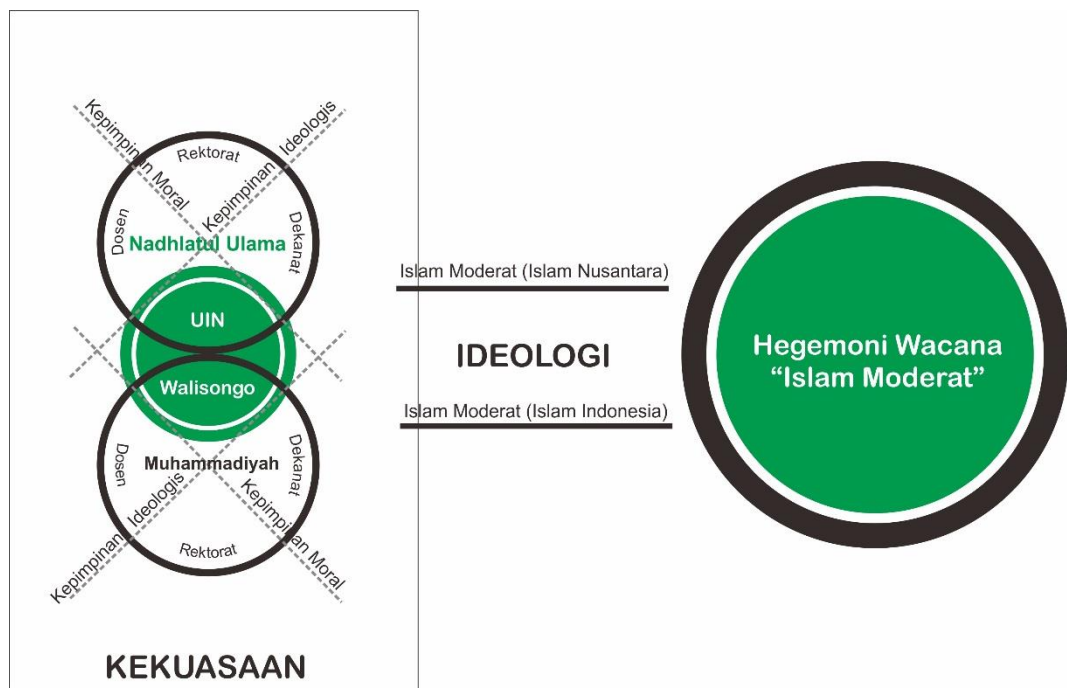
| | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 26. | Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag. | Wakil Dekan I FITK |
| 27. | Drs. Muslam, M.Ag. | Wakil Dekan II FITK |
| 28. | Dr. Muslih M.A. | Wakil Dekan III FITK |
| 29. | Dr. H. Sulaiman, M.Ag | Wakil Dekan III FUHUM |
| 30. | Rokhmah Ulfah, M.Ag. | Wakil Dekan II FUHUM |
| 31. | Dr. Safii, M.Ag. | Wakil Dekan III FUHUM |
| 32. | Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag | Wakil Dekan II FISIP |
| 33. | H. Amin Farih, M.Ag. | Wakil Dekan III FISIP |

2. UIN Walisongo dan Muhammadiyah Jawa Tengah (Struktural)⁶

| No. | Nama | Jabatan di UIN Walisongo | Jabatan di Muhammadiyah Jawa Tengah 2015-2020 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Drs. H. Tafsir, M.Ag | Dosen FUHUM | Ketua |
| 2. | Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag | Wakil Rektor III | - |
| 3. | Priyono, M.Pd. | Kepala Biro AUPK | - |
| 4. | Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA | Wakil Rektor III (2015-2019) | Wakil Ketua dan Pembina LBMH dan LPP Pontren |
| 5. | Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | Wakil Ketua dan Pembina LAZISMU |
| 6. | Dr. Ahwan Fanani, M.Ag | Wakil Dekan I FISIP | - |

⁶ Data ini termasuk pengurus di tingkat daerah, anggota biasa atau pun memiliki ikatan kultural dengan Muhammadiyah.

| | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| 7. | Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, MA | Guru Besar FUHUM | Wakil Ketua dan Pembina MPS dan Majelis Lingkungan Hidup |
| 8. | Drs. H. Wahyudi, M.Pd | Wakil Dekan III FITK (2015- 2019) | Wakil Ketua dan Pembina Majelis Pustaka & Informasi |
| 9. | Drs. Danusiri, M.Ag | Dosen FITK | Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus |



Gambar 1. Ilustrasi Simbiosis Mutualisme NU dan Muhammadiyah di UIN Walisongo

Dengan memperhatikan struktur organisasi di UIN Walisongo, peneliti melihat bahwa NU dan Muhammadiyah mendominasi kepemimpinan strategis di UIN Walisongo, baik pimpinan di tingkat rektorat mau di tingkat dekanat. NU dan Muhammadiyah juga mendominasi di kelembagaan UIN Walisongo seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Hegemoni Wacana moderatisme Islam ala NU dan Muhammadiyah terjadi konsensus atau kesepakatan dalam internal untuk mengembangkan gagasan dalam kampusnya. Kesepakatan moral tersebut terjadi secara alami dan tidak ada paksaan di dalamnya. Hegemoni ini ada karena adanya kepemimpinan moral dan intelektual dari para pemimpin UIN Walisongo yang notabene juga bagian struktural ataupun kultural dari NU atau Muhammadiyah. Menurut Haryanto (2017), dengan persebaran kekuasaan pimpinan di UIN Walisongo yang didominasi oleh kultur NU dan Muhammadiyah, pendistribusian kekuasaan semacam ini menggunakan model elitis sekaligus pluralis. Model elitis adalah kekuasaan tidak terdistribusikan secara tidak merata, sehingga memunculkan kelompok pengusaha atau *the ruling class* dan kelompok massa. Sedangkan model pluralis adalah kekuasaan tidak terdistribusikan sebagaimana dijelaskan oleh model elit. Akan tetapi mendistribusikan kekuasaan dengan melihat setiap kelompok masyarakat yang diperhitungkan keberadaannya.⁷

Peran NU dan Muhammadiyah terhadap perkembangan gagasan moderatisme Islam di UIN Walisongo sangatlah besar. Hal ini tentu dapat dilihat dari kegiatan, aktivitas, serta produksi wacana Islam *Wasathiyah* yang sangat dekat dengan moderatisme Islam ala NU dan Muhammadiyah. Kolaborasi NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah juga nampak pada distribusi kekuasaan yang ada di UIN Walisongo. Hampir mayoritas jabatan-jabatan strategis (rektor, wakil rektor, dekan, ketua lembaga, dan dosen) di kampus tersebut dikuasai oleh kader, pengurus, ataupun simpatisan dari kedua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Simbiosis inilah yang kemudian menjakan NU dan Muhammadiyah mempunyai legitimasi moral dan struktural yang cukup kuat di UIN Walisongo dalam kurun waktu 2015 hingga sekarang ini.

Dalam perspektif teori relasi kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault, dominasi pengetahuan yang berkembang tidak terlepas dari kekuasaan yang

⁷ Haryanti, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: PolGov Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 68-69.

mendominasi. Adanya kekuasaan yang didominasi oleh kelompok tertentu mengakibatkan adanya dominasi wacana. Dominasi satu kelompok atas kelompok lain memicu adanya sebuah hegemoni. Dalam perspektif Gramsci, hegemoni tidak diperoleh melalui paksaan (*coercive actions*), melainkan melalui konsensus atau kesepakatan kelompok atas kelompok lain. Menurut Martin Canoy dalam Subono (2003), hegemoni adalah suatu proses dalam *civil society* dimana kelompok dominan melakukan kontrol melalui kepemimpinan moral dan intelektual.

Simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah di UIN Walisongo tentu membuat mereka mempunyai kesempatan yang strategis untuk melancarkan agenda tentang wacana moderatisme Islam ala mereka. Simbiosis inilah yang kemudian menjadikan munculnya praktik hegemoni wacana yang terjadi di UIN Walisongo. Hegemoni ini lahir ketika adanya kesepakatan atau konsensus antara pimpinan kampus dan civitas akademika kampus, adanya ideologi Islam moderat yang menyatukan mereka, dan juga didukung oleh kekuasaan yang didominasi oleh kultural NU atau pun Muhammadiyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

UIN Walisongo mempunyai sejarah yang panjang dalam konsistensinya sebagai perguruan tinggi yang menyuarakan gagasan moderatisme Islam di Indonesia. Sejarah UIN sebagai perguruan tinggi Islam tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah di Jawa Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam terjadinya pengarusutamaan gagasan moderatisme Islam di UIN Walisongo. Pengaruh NU dan Muhammadiyah di UIN Walisongo hadir melalui faktor struktural maupun non struktural. NU atau Muhammadiyah secara struktural mendominasi pimpinan di UIN Walisongo, mulai dari pimpinan rektorat, dekanat, guru besar, dosen, hingga pimpinan mahasiswa. Sedangkan pengaruh non struktural/ kekuasaan dari NU atau Muhammadiyah di UIN Walisongo adanya ikatan kultural antar civitas akademika UIN Walisongo tentang ideologi Islam Moderat.

Faktor struktural dan ideologi tersebutlah kemudian memunculkan hegemoni wacana keagamaan di UIN Walisongo, yaitu wacana Islam moderat. Hegemoni ini terjadi ketika adanya konsensus dan komitmen akan ideologi tertentu antara kelas sosial, pimpinan dan warga UIN Walisongo. Keadaan hegemonik ini selain dipengaruhi oleh konsensus juga dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada, sehingga semakin memantapkan keadaan ini. Dengan pandangan yang sama tentang Moderatisme Islam, simbiosis mutualisme antara NU dan Muhammadiyah kemudian menciptakan hegemoni wacana keagamaan, yaitu Islam Moderat.

Kesuksesan UIN Walisongo (dulu hingga sekarang) terkait konsistensinya terhadap

B. Penutup

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menyelesaikan riset ini. Bagaimanapun peneliti menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam melakukan riset ini. Riset ini hanya awal untuk memahami problemaitika sosial-filosofis akan kebebasan manusia. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk mengembangkan riset ini. Semoga riset ini dapat bermanfaat secara akademik dan praktik bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga bermanfaat. amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, M. A. (2007). *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia* (3 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Anam, C. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Aksara Mulia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barnadib, I. (1982). *Arti dan Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.
- Bertens, K. (1985). *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*. (A. Van Melson, Penerj.) Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, M., Soemardi, S., Anderson, B. R., Koentjaraningrat, Moertono, S., & Zainuddin, A. R. (1983). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta, Indonesia: Sinar Harapan.
- Foucault, M. (2012). *The Archeology of Knowledge*. (K. Wiradyana, Penerj.) Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Hall, S. (1992). *Culture, Media dan Language*. London: Routledge. Dipetik Maret 20, 2020
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, K. (1996). *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Paramadina.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1991). *Sosiologi*. (A. Ram, & T. Sobari, Penerj.) Jakarta: Erlangga.
- Muhajir, N. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Nashir, H. (2008). *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, I. (2017). *Islam Indonesia, Islam Paripurna: Pergulatan Islam Pribumi dan Islam Transnasional*. Jakarta: Yayasan Omah Aksoro Indonesia.

- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Keresasian al-Quran* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. (Kamdani, & I. Baehaqi, Penerj.) Yogyakarta: Insist.
- Sumarto, H. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suprayogo, I. (2003, July). Telaah Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah. *El-Harakah*, 5(2), 1.
- Surahmat, W. (2004). *Pengantar Ilmiah Penelitian Dasar; Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Surbakti, R. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Taufiq, A. (2005). *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UIN Walisongo. (2015). *Laporan Rektor UIN Walisongo Tahun 2015*. Semarang: UIN Walisongo
- _____, I. (1995). *Buku Kenangan Lustrum V*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Wahid, M., Suwendi, & Zuhri, S. (1999). *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. (M. Wahid, Suwendi, & S. Zuhri, Penyunt.) Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Woodfin, R., & Zarate, O. (2008). *Marxisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist.
- Sumber Jurnal:
- Alhidayatillah, N., & Sabiruddin. (2018). Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia. *Al-Imam*, 1(1), 10. Dipetik Maret 27, 2020.
- Aminuddin, L. H. (2018). REKONSTRUKSI WACANA MODERNIS-TRADISIONALIS: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi. *Kodifikasia*, 12(1), 96. Dipetik Maret 20, 2020.
- Carothers, T., & Barndt, W. (1999). Civil society. *Foreign Policy*, 117, 18-29. Dipetik Maret 27, 2020, dari <http://doi.org/10.2307/1149558>

- Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. (2018, Oktober). Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Wacana Politik*, 3(2), 108-120. Dipetik Maret 27, 2020.
- Halim, W. (2017, Juli). Peran Pesantren dalam Wacana dan Pemberdayaan Masyarakat Madani. *Akademika*, 22(2), 191-218.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. (D. Rafiq, Ed.) Yogyakarta: PolGov. Retrieved from <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/f/810/elit-massa-dan-kekuasaan-haryanto>
- Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Miqot*, 36(2), 262-281. doi: <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Kamahi, U. (2017, Juni). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Al-Khitabah*, 3(1), 120. Dipetik Maret 20, 2020
- Miftahuddin, Widiyanta, D., & Dwikurniarini, D. (2012). *PERAN ORGANISASI ISLAM: DARI PERJUANGAN MENUJU KEMERDEKAAN SAMPAI MASA PERANG KEMERDEKAAN (1936-1949)*. Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Ilmu Sejarah, Yogyakarta. Dipetik 03 20, 2020, dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/miftahuddin-mhum/penlt-2012-peran-orgnsasi-islam.pdf>
- Muthoifin. (2017, April). Islam Berkemajuan Perspektif Ahmad Syafi'i Ma'arif: Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. *Wahana Akademika*, 4(1), 117-132. Dipetik Maret 27, 2020, dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/1483/1100>
- Niam, Z. W. (2019). Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia. *PALITA*, 4(2), 91-106.
- Prasodjo, E. (2004). People and Society Empowerment; Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Administrasi Publik*, 4(2), 10-24. Dipetik Maret 28, 2020
- Rofiah, K. (2016, Desember). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *KALAM*, 10(2), 476. Dipetik Maret 21, 2020.
- Subono, N. I. (2003, Agustus). Civil Society, Patriarki, dan Hegemoni. *CIVIC*, 1(2), 27-36. Dipetik Maret 28, 2020.

Suryani, T. (2018). *Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Industri 4.0*. Pamekasan: Universitas Islam Madura. Dipetik Maret 21, 2020

Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi*, 18(2), 149. doi: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1863>

Visser, M. (1990). *Five Theories of Voting Action; Strategy and Structure of Psychological Explanation*. University of Twente, Twente. Dipetik Maret 21, 2020, dari <https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6078399/t0000001.pdf>

Sumber Internet:

Abduh. (2018, Maret 29). *Ulama Perempuan Diminta Peka Persoalan Kebangsaan*. Dipetik Maret 26, 2020, dari Metro Semarang: <https://metrosemarang.com/ulama-perempuan-diminta-peka-persoalan-kebangsaan-65854>

Admin. (2018, Oktober 2). <https://bangkitmedia.com/ini-susunan-pengurus-pwnu-jawa-tengah-masa-khidmat-2018-2023/>. Dipetik April 18, 2020, dari Bangkit Media: <https://bangkitmedia.com/ini-susunan-pengurus-pwnu-jawa-tengah-masa-khidmat-2018-2023/>

Alawi, A. (2019, Agustus 18). *NU Berdiri untuk Kemerdekaan Indonesia*. Dipetik Maret 23, 2020, dari NU online: <https://www.nu.or.id/post/read/109969/nu-berdiri-untuk-kemerdekaan-indonesia>

Ali, H. (2017, Januari 17). *Menakar Jumlah Jamaah NU dan Muhammadiyah*. Dipetik Maret 21, 2020, dari Hasanuddin Ali: <https://hasanuddinali.com/2017/01/19/menakar-jumlah-jamaah-nu-dan-muhammadiyah/>

Assidiq, Y. (2018, Oktober 22). *Perjuangan Muhammadiyah untuk Bangsa*. Dipetik Maret 23, 2020, dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/18/10/22/ph02vn399-perjuangan-muhammadiyah-untuk-bangsa>

Autad. (2016, Desember 21). *Alumni Ushuluddin Tahlilan, Bukti Fakultas Ini Bukan Sarang Pemurtadan*. Dipetik Maret 26, 2020, dari Duta Islam: https://www.dutaislam.com/2016/12/alumni-ushuluddin-tahlilan-bukti-fakultas-ini-bukan-sarang-pemurtadan.html?hl=in_ID

Diktis Kemenag RI. (2019). *Daftar PTKI*. Dipetik Maret 21, 2020, dari Diktis Kemenag: http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php

- Flo, E. (2015, Juli 24). *Ketua Umum PBNU: Sekali Lagi, NU Bukan Partai Politik*. Dipetik Maret 28, 2020, dari Merah Putih: <https://merahputih.com/post/read/ketua-umum-pbnu-sekali-lagi-nu-bukan-partai-politik>
- Ilham. (2015, Agustus 2). *Jumlah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Lebih dari 10 Ribu*. Dipetik Maret 20, 2020, dari Republika: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/02/nsgkgj361-jumlah-lembaga-pendidikan-muhammadiyah-lebih-dari-10-ribu>
- Ika. (2019, Januari 25). *NU dan Muhammadiyah Berperan Dalam Menjaga Perdamaian Dunia*. Dipetik Maret 25, 2020, dari ugm.ac.id: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/17613-nu-dan-muhammadiyah-berperan-dalam-menjaga-perdamaian-dunia>
- Muiz. (2019, Juli 27). *Rektor Baru Ingin Jadikan UIN Walisongo Pusat Moderasi*. Dipetik Maret 21, 2020, dari NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/109116/rektor-baru-ingin-jadikan-uin-walisongo-pusat-moderasi->
- Niam, A. M. (2017, Agustus 11). *Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya*. Dipetik 03 20, 2020, dari nuonline: <https://www.nu.or.id/post/read/80195/secara-kuantitas-pendidikan-nu-tidak-ada-tandingannya>.
- Niam, A. M. (2017, November 10). *Inilah Tokoh-tokoh NU Bergelar Pahlawan Nasional*. Dipetik 03 20, 2020, dari nuonline: <https://www.nu.or.id/post/read/83084/inilah-tokoh-tokoh-nu-bergelar-pahlawan-nasional>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018, Oktober 22). *Para Tokoh Muhammadiyah dan Jasa Besarnya Bagi Republik Indonesia*. Dipetik 03 20, 2020, dari umm.ac.id: <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/15097.html>
- Rahmah, G. (2017, Mei 2). *50 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tolak Paham Radikal*. Dipetik Maret 21, 2020, dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/871301/50-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-negeri-tolak-paham-radikal>
- Wahid, A. (2007, Maret 8). *NU, Muhammadiyah dan Pancasila*. Dipetik Maret 22, 2020, dari gusdur.net: <http://www.gusdur.net/id/gagasan/gagasan-gusdur/nu-muhamadiyah-dan-pancasila>
- Maghfiroh, K. (2018, April 2). *Ini Jadwal Rangkaian Acara Dies Natalis ke-48 UIN Walisongo*. Dipetik Maret 27, 2020, dari Amanat: <https://amanat.id/ini-jadwal-rangkaian-acara-dies-natalis-ke-48-uin-walisongo/>

- Mumazziq Z, R. (2017, Agustus 1). *Peran NU untuk Perdamaian Dunia*. Dipetik Maret 23, 2020, dari NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/80026/peran-nu-untuk-perdamaian-dunia>
- PW Muhammadiyah Jateng. (2016). *Profil Pimpinan*. Dipetik April 18, 2020, dari pwmjateng.com: <http://pwmjateng.com/profil-pimpinan/>
- PW NU Jateng. (2013). *Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Masa Khidmat 2013-2018*. Dipetik April 18, 2020, dari NU Jateng: <https://nujateng.com/pwnu/>
- PW NU Jawa Tengah. (2013). *Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Masa Khidmat 2013-2018*. Dipetik April 18, 2020, dari NU Jateng: <https://nujateng.com/pwnu/>
- Redaksi JD. (2019, Juli 29). *Berharap Jiwa Walisongo Melekat dalam Diri Rektor Baru UIN Walisongo*. Dipetik April 18, 2020, dari Jateng Daily: <https://jatengdaily.com/2019/berharap-jiwa-walisongo-melekat-dalam-diri-rektor-baru-uin-walisongo/>
- Rochmat, A. M. (2018, Desember 9). *Lima Pendekatan Dakwah Wali Songo*. Dipetik Maret 25, 2020, dari NU online: <https://islam.nu.or.id/post/read/100058/lima-pendekatan-dakwah-wali-songo>
- Soebahar, E. (2017, April 6). *Selamat Memperingati Dies Natalis Ke-47 UIN Walisongo*. Dipetik Maret 25, 2020, dari erfansoebahar: <http://erfansoebahar.web.id/selamat-hari-kamis-ini-uin-walisongo-memperingati-dies-ke-47/>
- Suara Muhammadiyah. (t.thn.). *Sejarah Singkat Muhammadiyah*. Dipetik Maret 23, 2020, dari Muhammadiyah: <http://www.muhammadiyah.or.id/content-178-det-sejarah-singkat.html>
- Tim Humas Kanwil Kemenag Jawa Tengah. (2017, Mei 12). *Reuni Akbar Alumni UIN Walisongo Semarang*. Dipetik Maret 26, 2020, dari Kanwil Kemenag Jawa tengah: <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/reuni-akbar-alumni-uin-walisongo-semarang>
- Tribun Jateng. (2019, Agustus 5). *Prof Dr Imam Taufiq MAg, Santri Jombang jadi Rektor UIN Walisongo Semarang*. Dipetik April 18, 2020, dari Tribun News Jateng: <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/05/prof-dr-imam-taufiq-mag-santri-jombang-jadi-rektor-uin-walisongo-semarang>
- UIN Walisongo. (2018). *Rencana Strategi (Renstra) UIN Walisongo tahun 2019-2023*. Semarang: UIN Walisongo. Dipetik April 18, 2020, dari <https://walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Renstra-UIN-Walisongo-2019-2023.pdf>

_____. (2017). *Fakultas dan Pasca Sarjana*. Dipetik April 1, 2020, dari walisongo: https://walisongo.ac.id/?page_id=5400

Widiaturrahmi. (2016, Februari 7). *Gus Mus: Beberapa Persamaan NU dan Muhammadiyah*. Diambil kembali dari NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/65574/gus-mus-beberapa-persamaan-nu-dan-muhammadiyah>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data diri

Nama : Moh. Misbakul Munir
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 21 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Rt. 01 Rw. 02 Dsn. Sumberwaru Ds. Banjarnyar
Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur
Handphone : 08563626966
Status : Belum Menikah
E-Mail : moch.misbakhul.munir2144@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Banjarnyar 2 (2001-2007)
SMP : MTsN 2 Nganjuk (2007-2010)
SMA : MAN 1 Nganjuk (2010-2013)
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
S1 Aqidah dan Filsafat Islam (2013-2020)